

# CATATAN

## TALKSHOP NILAI EKONOMI KARBON

### RENCANA KEBIJAKAN INSTRUMEN NILAI EKONOMI KARBON: POTENSI MANFAAT DAN DAMPAKNYA BAGI MASYARAKAT, HUTAN, DAN IKLIM?



Narasumber



Narasumber



Narasumber



Penanggap

**JOKO TRI HARYANTO, S.E., M.S.E**

Peneliti Badan Kebijakan Fiskal  
Kementerian Keuangan

**RUDI SYAF**

Direktur Eksekutif  
KKI WARS

**DHARSONO HARTONO**

President Director  
PT Rimba Makmur Utama  
(RMU)

**NADIA HADAD**

Direktur Pengembangan Strategis  
Yayasan Madani Berkelanjutan



Penanggap



Penanggap



Moderator

**DICKY EDWIN HINDARTO**

Yayasan Mitra Hijau

**JAMRIS**

Perwakilan  
Komunitas Pengelola Hutan  
Rio Laman Panjang  
Kabupaten Bungo

**GITA SYAHRANI**

Kepala Sekretariat  
LTKL

Rabu, 12 Agustus 2020

## *TalkShop Series*

# Rencana Kebijakan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon: Apa dan Bagaimana Potensi Dampaknya bagi Komunitas, Hutan, dan Iklim?

Rabu, 12 Agustus 2020

*Diselenggarakan oleh Madani bersama KKI-Warsi, LTKL, dan Kemitraan*

### **Pengantar tentang NDC dan NEK**

Gita Syahrani, Kepala Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari

TalkShop ini tentang Nilai Ekonomi Karbon. Kolaborasi Madani, Warsi, LTKL, dan Kemitraan sebagai bagian dari Hari Hutan Indonesia 2020. Link YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=rBL0sobG6Cw>. Narasumber yang hadir mewakili berbagai lokasi yang berbeda di Indonesia - harapannya kita bisa belajar dari berbagai lokasi yang berbeda. Rudi Syaf dari Sumatra dan Dharsono dari Kalimantan. Kita akan berjalanan ke sekeliling hutan Indonesia untuk mengetahui kaitan antara menjaga hutan dengan Nilai Ekonomi Karbon.

Narasumber yang hadir adalah Joko Tri Haryanto dari BKF, Dharsono Hartono dari Rimba Makmur Utama dan Rudi Syaf dari KKI Warsi. Penanggap: Nadia Hadad dari Madani, Dicky Edwin Hindarto, dan Jamris Kepala Desa Laman Panjang yang selama ini sudah mendapatkan keuntungan dari NEK.

Selama dua jam ke depan kita akan belajar tentang potensi manfaat dan dampak NEK terhadap hutan, iklim, dan masyarakat.

You are viewing Yayasan Madani Berkelanjutan's screen

No.	Waktu	Agenda	Keterangan
1.	10.00 – 10.15	Pembukaan	Moderator
2.	10.15 – 11.00	Paparan Narasumber	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Bapak Joko Tri Hartanto, S.E., M.S.E.</b>, Peneliti Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI</li> <li>2. <b>Bapak Rudi Syaf</b>, Direktur Eksekutif Komunitas Konservasi Indonesia-Warsi</li> <li>3. <b>Bapak Dharsono Hartono</b>, President Director PT Rimba Makmur Utama (RMU)</li> </ol>
3.	11.00 – 11.30	Sesi Tanya Jawab	Moderator
4.	11.30 – 12.00	Tanggapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Bapak Dicky Edwin Hindarto</b>, Yayasan Mitra Hijau</li> <li>2. <b>Ibu Nadia Hadad</b>, Direktur Pengembangan Strategis Yayasan Madani Berkelanjutan</li> <li>3. <b>Bapak Jamris</b>, Perwakilan Komunitas Pengelola Hutan, Rio Laman Panjang, Kabupaten Bungo</li> </ol>
5.	12.00 – 12.45	Diskusi	Moderator
6.	12.45 – 13.00	Penutup dan wrap up	Moderator

Gita Syahrani | LTKL

Audio Settings | Chat | Raise Hand | Q&A | Leave

## Kenapa ada diskusi ini?

Ada berbagai informasi di media tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Kalau kita google NEK, IELH atau Paris Agreement atau Lol, yang keluar adalah berbagai artikel. Sementara itu, yang resmi dan bisa dikutip langsung ada dua dokumen.

You are viewing Gita Syahrani | LTKL's screen

Recovering

instrumen nilai ekonomi karbon

[All](#)
[Images](#)
[News](#)
[Videos](#)
[Maps](#)
[More](#)
[Settings](#)
[Tools](#)

About 180,000 results (0.42 seconds)

[klikhijau.com](#) › read › nilai-ekonomi... › Translate this page  
**Nilai Ekonomi Karbon Akan Diatur Resmi Pemerintah, Begini ...**  
 Jul 9, 2020 - Klikhijau.com – Nilai Ekonomi Karbon (NEK) atau carbon pricing akan ... Kebijakan pengaturan Instrumen NEK akan menjadi landasan legal ...

[ppid.menhk.go.id](#) › browse › Translate this page  
**Menteri LHK : Presiden Setuju Segera Diatur Nilai Ekonomi ...**  
 Jul 7, 2020 - Menteri LHK : Presiden Setuju Segera Diatur Nilai Ekonomi Karbon ... Kebijakan pengaturan Instrumen NEK akan menjadi landasan legal ...

[ppid.menhk.go.id](#) › browse › Translate this page  
**Berhasil Tekan Deforestasi, Indonesia Terima Dana dari ...**  
 May 20, 2020 - ... atas prestasi penurunan emisi karbon dari kehutanan tahun 2016/2017 ... Peraturan Presiden tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon.

[setkab.go.id](#) › rapat-terbatas-mengen... › Translate this page  
**Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Rapat Terbatas ...**  
 Jul 6, 2020 - ... dan Kebijakan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (Carbon Pricing), 6 Juli ... kewajiban untuk penurunan emisi karbon di sektor kehutanan 17,2 ... You visited this page on 8/11/20.

**KEYWORDS :**

- Instrumen Nilai Ekonomi Karbon
- Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
- Paris Agreement
- LOI Norway Indonesia

Gita Syahrani | LTKL

Audio Settings | Chat | Raise Hand | Q&A | Leave



Yang disorot Presiden saat Rapat Terbatas tentang nilai ekonomi karbon:

- Target/kewajiban kita untuk pengurangan emisi = NDC (29% penurunan emisi di tahun 2030 dan 41% kalau ada dukungan dan kerja sama teknis dari luar negeri)
- Pemulihan lingkungan, perlindungan gambut, percepatan RHL, Karhutla, perlindungan biodiversity, dan pengembangan biodiesel.
- Harus ada insentif bagi para pemangku kepentingan.

The screenshot shows a Zoom meeting interface. The main content is a news article from the Indonesian government website. The article title is "Rapat Terbatas mengenai Kelanjutan Kerja Sama Penurunan Rumah Kaca (GRK) Indonesia-Norwegia dan Kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (C 6 Juli 2020, di Istana Me... DKI Jakarta". The author is "Oleh Humas" and it was published on "6 Juli 2020". The category is "Panganta". There is a sub-headline: "Tekan Emisi Gas Rumah Kaca, Presiden: Terus Konsisten Jalankan Program Pemulihan Lingkungan". The author is "Oleh Humas" and it was published on "6 Juli 2020". The category is "Berita" and it has been read "124 Kali". There is a photo of a meeting in the Istana Merdeka.

Selain kita memiliki target untuk emisi karbon yang harus diturunkan berdasarkan Konvensi Perubahan Iklim yang telah kita ratifikasi, yaitu 29 persen pada 2030 dan 41 persen dengan dukungan kerja sama teknik dari luar negeri, dan berdasarkan Konvensi Perubahan Iklim, kita memiliki kewajiban untuk penurunan emisi karbon di sektor kehutanan 17,2 persen, sektor energi 11 persen, dan sektor limbah 0,32 persen, serta sektor pertanian 0,13 persen, serta sektor industri dan transportasi sebesar 0,11 persen. Untuk itu, pada kesempatan ini saya ingin menegaskan lagi beberapa hal.

You are viewing Gita Syahrani | LTKL's screen

View Options

Gita Syahrani | LTKL

Yang pertama, kita harus terus konsisten menjalankan program pemulihan lingkungan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, kemudian juga perlindungan gambut dan percepatan rehabilitasi hutan dan lahan harus terus dilanjutkan, dan pada kesempatan yang baik ini saya juga ingin titip, hati-hati masalah kebakaran hutan dan lahan, ini sudah masuk ke musim panas. Kemudian berbagai upaya lain, seperti perlindungan *biodiversity* yang sudah melekat sebagai upaya pengendalian hutan dan pemulihan habitat juga harus dipastikan betul-betul berjalan di lapangan, juga pengembangan selanjutnya, pengembangan biodiesel B30, B50, dan akan ke B100, juga pengembangan energi surya, energi angin, saya kira kita juga sudah memulai ini agar terus dilanjutkan.

Audio Settings

Chat Raise Hand Q&A Leave

You are viewing Gita Syahrani | LTKL's screen

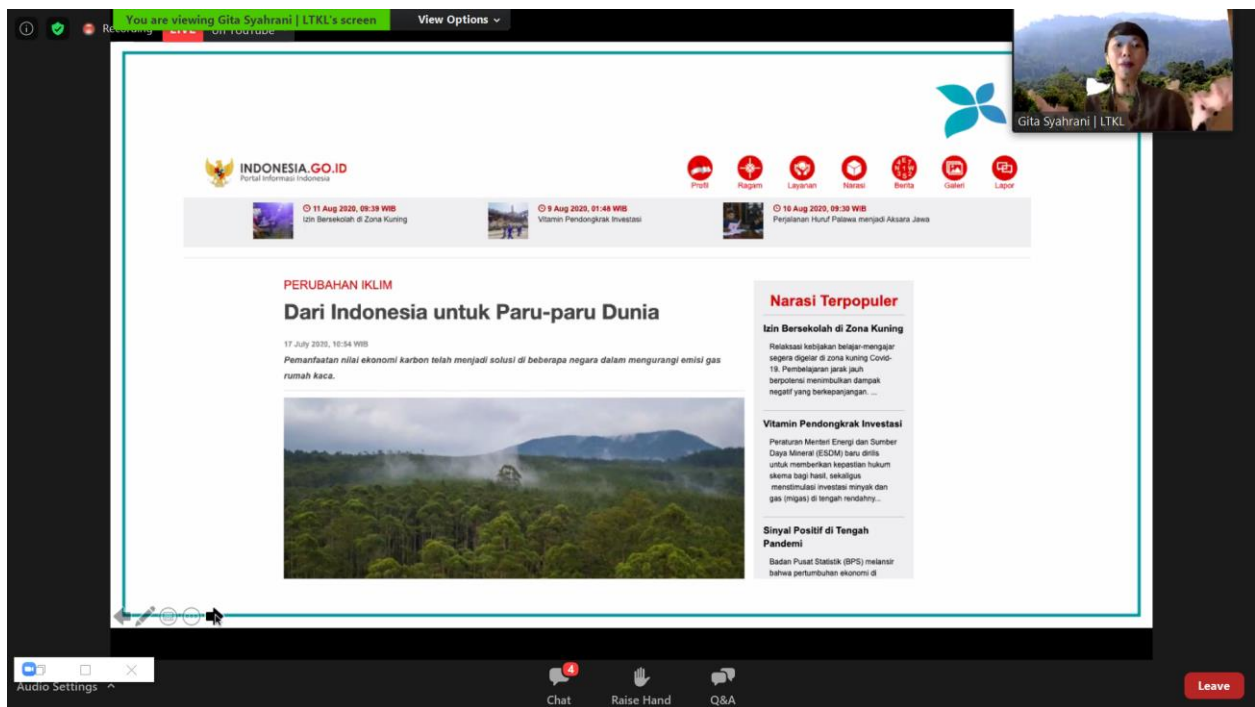
View Options

Gita Syahrani | LTKL

Yang kedua, seluruh tahapan dalam menurunkan emisi gas rumah kaca harus segera diselesaikan. Regulasinya selesaikan, urusan instrumen untuk pendanaannya yang kita harapkan ini termasuk insentif bagi pemangku kepentingan, ini juga harus kita lihat dan kita harus memastikan bahwa pengaturan karbon ini betul-betul memiliki dampak yang signifikan bagi pencapaian target penurunan gas rumah kaca sebesar 26 persen di 2020 dan 29 persen pada tahun 2030. Saya melihat, kita memiliki kesempatan banyak, baik itu di lahan hutan gambut, di hutan *mangrove*, dan juga di hutan-hutan kita lainnya. Saya kira kesempatan ini, saya kira bisa kita laksanakan apabila lapangannya betul-betul segera bisa kita kerjakan.

Audio Settings

Chat Raise Hand Q&A Leave



Narasi pemerintah dari sumber formal tentang isu ini:

- UU Lingkungan Hidup (32/2009)
- UU Pengesahan Paris Agreement (16/2016)
- Peraturan Presiden Instrumen Ekonomi Lingkungna Hidup
- Strategi Implementasi NDC (*Nationally Determined Contribution*) - sektor dan target
- Letter of Intent (Surat Niat) RI- Norway untuk kerjasama penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Tahun 2018 Indonesia sudah mengeluarkan Perpres Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup
- Sudah jelas urut-urutannya kenapa NEK jadi penting - bagian dari strategi penurunan emisi Negara - tapi harus ada dampak nyata untuk masyarakat di lapangan.

Strategi implementasi NDC - ada 9 program mulai dari pengembangan komitmen sampai dengan strategi implementasi dan pemantauan. Sudah terlihat 5 sektor utama: kehutanan, pertanian, energi, IPPU, limbah. Di masing-masing sektor sudah ada apa yang akan dilakukan. Bagaimana seluruh sektor dan aksi ini terkait dengan mekanisme Nilai Ekonomi Karbon?

You are viewing Gita Syahrani | LTKL's screen

## 9 PROGRAM STRATEGI IMPLEMENTASI NDC

**1** PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN

**4** PENYUSUNAN KEJAKSAAN KERJA DAN JARINGAN PENDUKUNG

**7** PENYUSUNAN PEDOMAN IMPLEMENTASI NDC

**2** KEMERDIAAN PASAR

**5** KEBIJAKAN SATU DATA GRK

**8** IMPLEMENTASI NDC

**3** ENABLING ENVIRONMENT

**6** PENYUSUNAN KEJAKSAAN BUDJANA DAN PROGRAM (KRP) MELUKA

**9** PEMANTAUAN DAN REVIEW NDC

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim

PNPI 2017  
TRANSISI  
**NDC**  
INTO ACTIONS

Audio Settings | Chat | Raise Hand | Q&A | Leave

You are viewing Gita Syahrani | LTKL's screen

## MITIGASI

### 5 SEKTOR FOKUS AKSI PENURUNAN EMISI GRK DALAM NDC:

**01** KEHUTANAN

**02** PERTANIAN

**03** ENERGI

**04** INDUSTRI

**05** LIMBAH

**Berdasarkan hasil dari proses komunikasi dengan K/L dan pakar :**

Pemilihan dan running model untuk menyusun skenario 2030, yang didasarkan pada: potensi penurunan emisi GRK, kebijakan dan program serta inisiatif baru di masing-masing sektor.

Breakdown kontribusi ke masing-masing sektor dalam upaya mencapai target penurunan emisi GRK sebesar 29% (unconditional) dan sampai dengan 41% (conditional) dari BAU tahun 2030.

**KEHUTANAN**

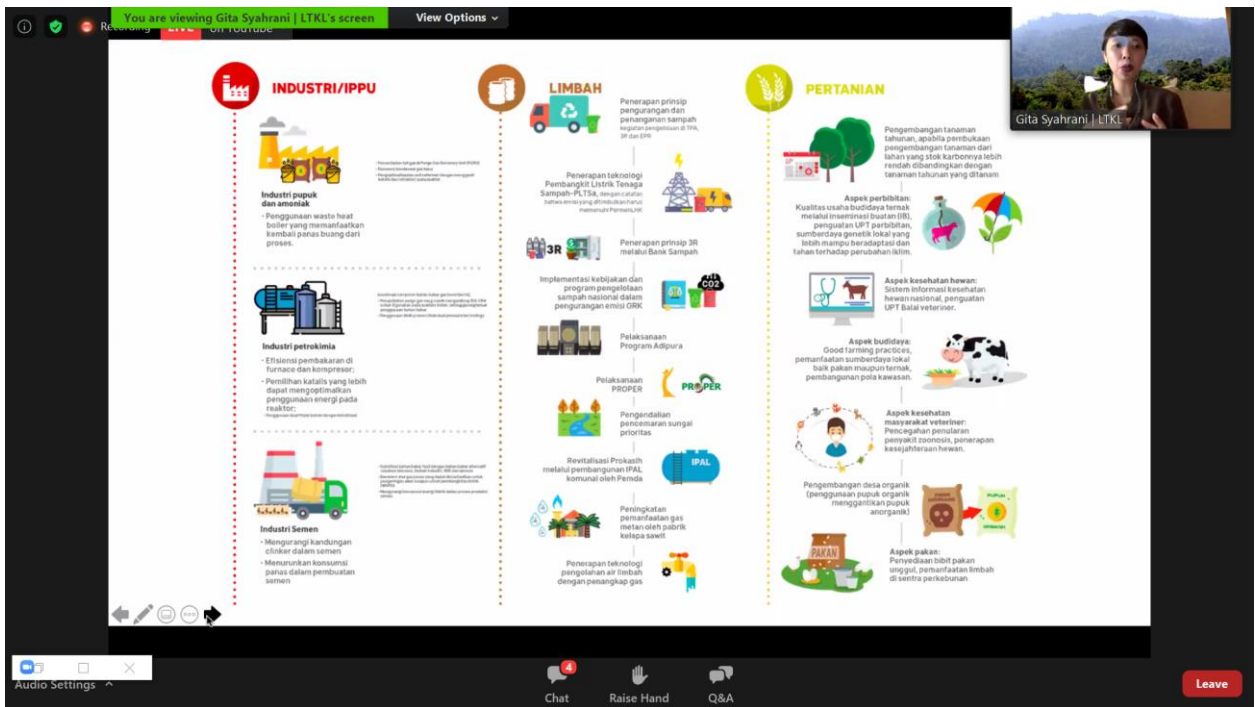
- Enabling environment melalui penyusunan kebijakan dan peningkatan wawasan hutan, RK TN, pembentukan KPP, Cakum
- Peningkatan produksi kayu dari Hutan Tanaman Industri (HTI)
- Pengelolaan Hutan Alam Lestari
- Implementasi Reduce Impact Logging (RIL) untuk mengurangi degradasi hutan
- Restorasi gembel
- Rehabilitasi hutan dan lahan
- Pengurangan deforestasi dan pengalihan Karhutla
- Pemanfaatan Kawasan konservasi alam (KKA) pada eksploitasi, pemertanian dan pengalihan ladang di lahan di kawasan hutan konservasi

**ENERGI**

- Penggunaan Energi Baru Terbarukan-EBT di pembangkit listrik
- Peningkatan Fuel Switching minyak tanah ke LPG, stasiun pengisian BBM, jaringgas gas
- Penerapan teknologi Clean Power
- Penerapan Energy Efficiency
- Akselerasi pengembangan transportasi massal dan kendaraan pribadi pengguna gas
- Akselerasi penggunaan listrik untuk transportasi
- Mengembangkan sistem angkutan umum massal
- Menyusun master plan pembangunan perkebunan terpadu batubara
- Menerapkan Eco Airport
- Membangun sistem Tol laut
- Pengembangan jalur Kereta Api Nasional, MRT, Trem Kereta Api Bandara atau PTW
- Integrasi traffic system-ITS dan ATIS
- Reklamasi pasca-lambang

Audio Settings | Chat | Raise Hand | Q&A | Leave





## Nilai Ekonomi Karbon dan Bisnis Masa Depan

Joko Tri Hartanto, S.E., M.S.E., Peneliti BKF, Kemenkue



Laksmi Dhewanthi jadi ketua tim pembahasan mekanisme NEK - kehadirannya sangat urgent. Tata kelola di pemerintah - pembahasan ranperpres ada di bawah Kemenko Marves, namun secara garis besar PIC-nya adalah KLHK (Bu Ami). Kemenkeu support dari sisi



financing. Ketika kita bicara batang tubuh, pendahuluan, kerangka konsep - ada bagian teknis, pembiayaan, mobilisasi pendanaan, dsb. Kita bicara kerangka besar dari NEK dulu.

Latar belakang - komitmen perubahan iklim Indonesia dan target NDC 29-41% pada 2030 dan di-break down ke masing-masing sektor. Support pendanaan adalah suatu keniscayaan untuk mencapai target NDC (Komitmen Iklim Indonesia).

**Komitmen Indonesia dalam Perubahan Iklim**

**Komitmen dan Kebijakan Indonesia**

- 2011**  
RAN-GRK  
Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (Peraturan Presiden No. 61/2011)
- 2014**  
RAN-API  
National Action Plan on Climate Change Adaptation
- 2016**  
Paris Agreement Ratification  
Dengan Undang-Undang No. 16/2016

**Indonesia Nationally Determined Contribution (NDC)**

- 29% penurunan emisi tanpa syarat dengan skenario Business as Usual (BAU)
- 41% penurunan emisi dengan syarat bantuan internasional

**Target Penurunan Emisi (MTCO<sub>2</sub>e) Hingga 2030 untuk Mencapai 29%**  
(Sektor; Mton CO<sub>2</sub>e; %)

Sektor	Mton CO <sub>2</sub> e	%
Kehutanan	497	60%
Energi	314	38%
Limbah	11	1%
IPPU	2,75	0%
Pertanian	9	1%

**Kebutuhan pendanaan di Indonesia berdasarkan NDC**

**Kebutuhan pendanaan NDC dari 2018-2030 sekitar USD 247 Miliar (USD 19 Miliar per tahun)**

Sektor	Value (Miliar USD)
Energi & transportasi	236,2
Hutan & penggunaan lahan	5,6
Proses industri & pemanfaatan produk	2,9
Limbah	2,17
Pertanian	0,38

Sumber: Second BUR (2018), dalam miliar USD

**Anggaran nasional (dalam juta) mencapai USD 5,8 Miliar per tahun\***

Ministry/Agency	Value (Miliar USD)
PUPR	3,531
Kemenhub	1,767
ESDM	186
KLHK	120
Kemantan	251
Kemenperin	3

\*Sumber: Rekapitulasi Budget Tagging (Kemenkeu) 2016 - 2018

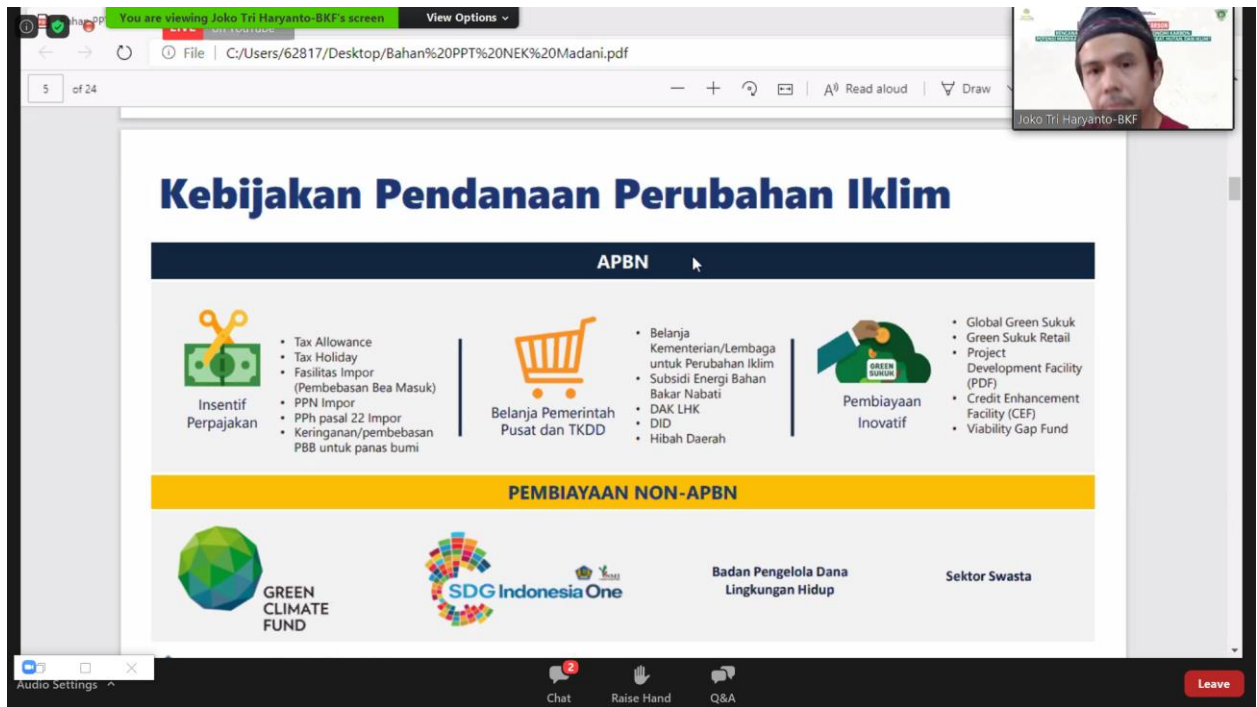
**Dukungan pendanaan internasional USD 0,9 Miliar per tahun\*\***

Sektor	Value (Miliar USD)
Energy	455,65
Transportation	446,24
Forestry	8,32
Agriculture	0,04
Waste	5,52
Multisector	8,42

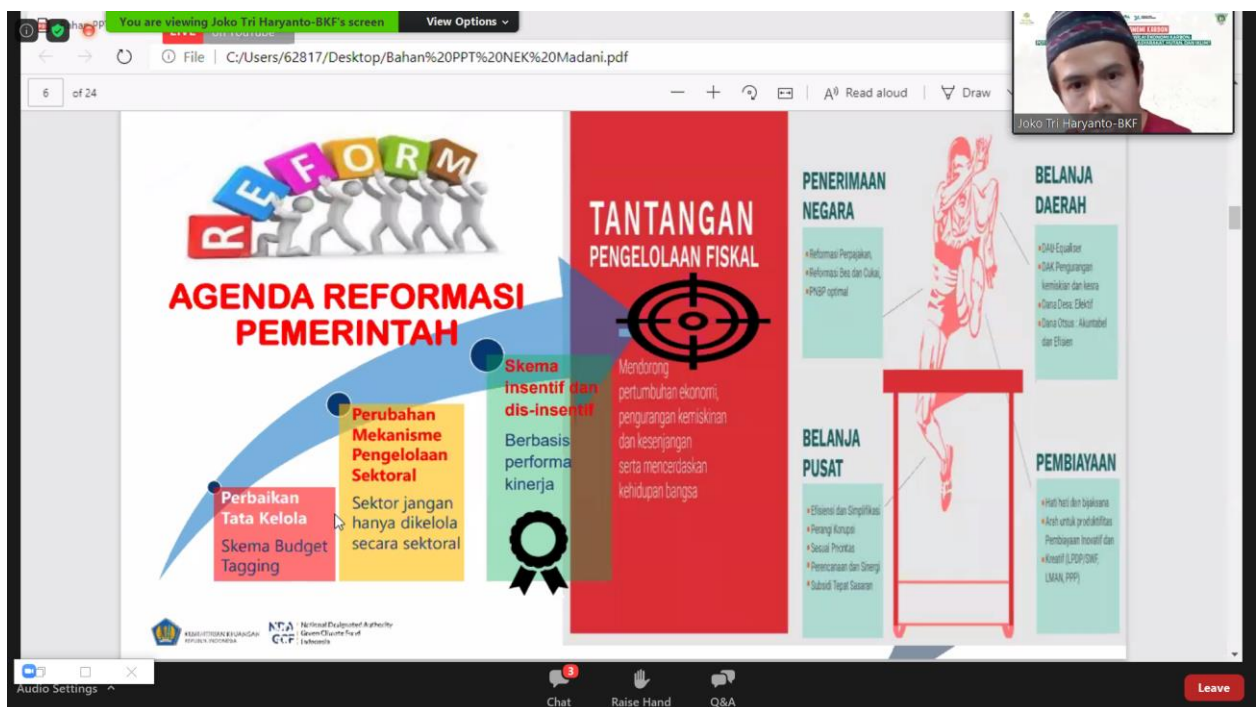
\*\*Sumber: Data 2015 - 2016 dukungan internasional, Second BUR

Kebutuhan pendanaan sektoral bisa dilihat di atas.

Menarik dibahas - di mana peran pemerintah dan peran non-pemerintah? Pembagian peran krusial karena dana publik yang ada untuk mendanai penanganan perubahan iklim tidak cukup, kapasitasnya hanya 20%. Perlu peran serta dan investasi dari swasta dan pasar. Bisnis Jasa lingkungan adalah Bisnis Masa Depan. Selain lingkungan, kita harus mengatasi pendidikan, kesehatan, dll. Dari cost-center menjadi revenue generation



Kebijakan pendanaan PI: insentif perpajakan, belanja pempus dan TKDD, dan pembiayaan inovatif. Yang harus dimunculkan adalah pembiayaan inovasi Non-APBN = termasuk model bisnis jasa lingkungan.



Pemerintah menjalankan agenda reformasi dulu. Sudah ada PP IELH - instrumen ekonomi lingkungan hidup = ada 18 instrumen, dibagi 3 kerangka besar

- Cluster bagaimana pemerintah lebih pro lingkungan
- Pengelolaan Dana Amanah = BPD LH
- Insentif dan Disinsentif Ekonomi = menghindari trade off konservasi dan pertumbuhan ekonomi. Ke depan, kita bisa tetap tumbuh dan menjaga lingkungan juga = double dividend = contoh payment for ecosystem services (PES), ecological fiscal transfer, green tax, green bond, green sukuk, dll

**PP NO 46/2017 TTG Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup**

**RIWIU TERHADAP LANDASAN TEORI**

- Beberapa mekanisme akselerasi pendanaan LH dapat dimanfaatkan;
- Misalnya PES (*double dividend*), Ecological Fiscal Transfer, Green Tax, Green Bond, Green Insurance dll;
- Terkendala produk regulasi turunan untuk level implementasi;

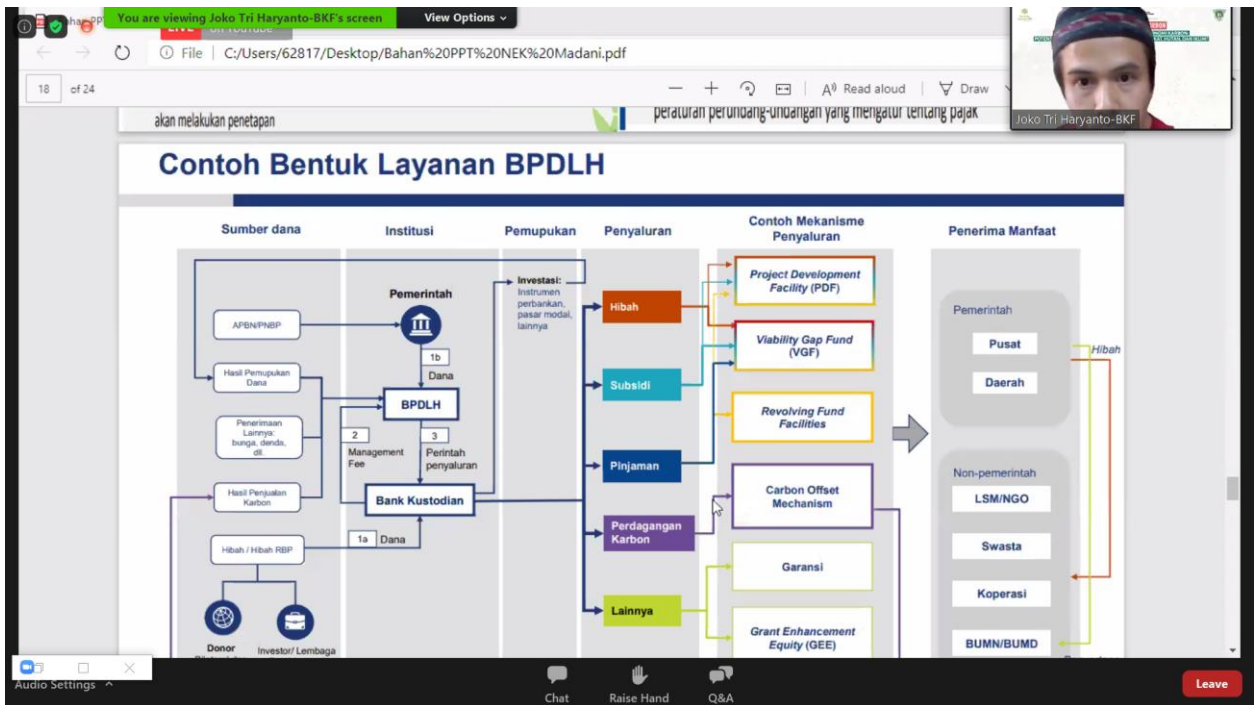
**INDONESIA GREEN BOND/SUKUK FRAMEWORK**

**MEDIUM GREEN Reviewed by Green Framework**

- Pillar I: Use of Proceeds** - 100% Used for refinancing and new financing of green projects
- Pillar II: Project Evaluation and Selection** - Budget Tagging Process to identify green projects
- Pillar III: Management of Proceeds** - MoF as issuer should guarantee 100% of proceed used to finance green projects
- Pillar IV: Reporting** - Reporting is expected to include measures of the reduction in greenhouse gas emissions

**9 ELIGIBLE GREEN SECTORS according to Green Framework**

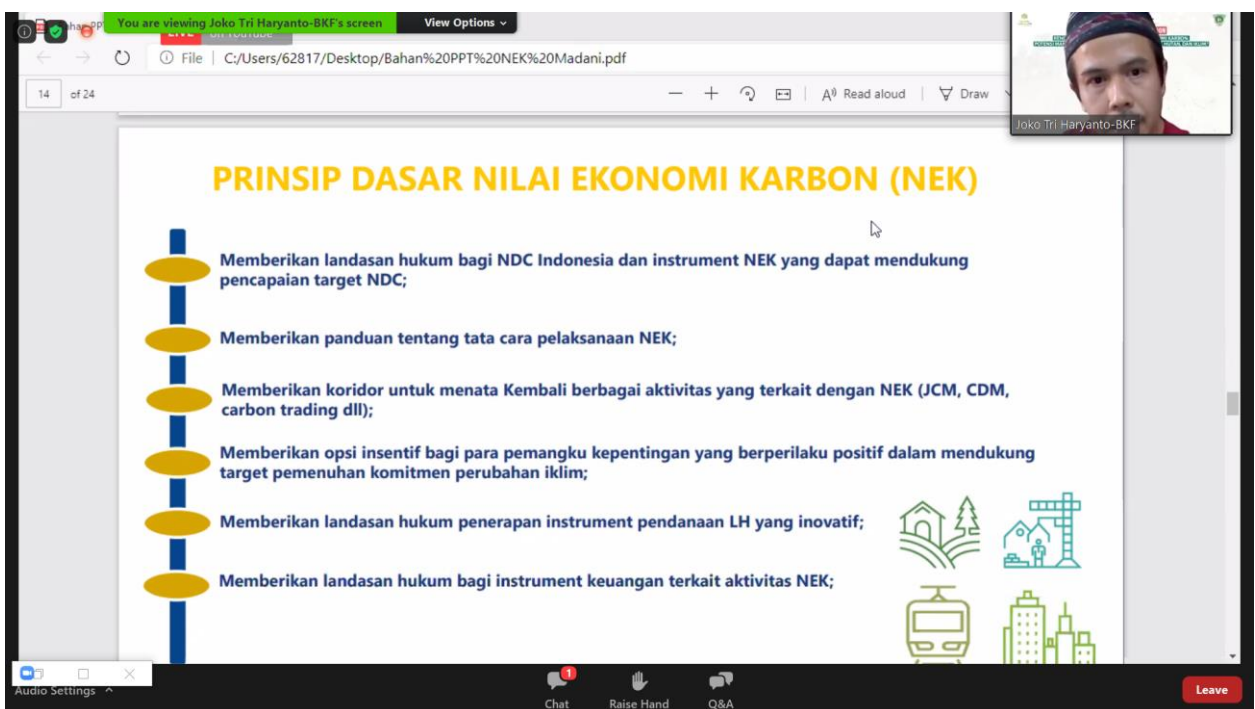




BPD LH bisa memfasilitasi perdagangan karbon. BPD LH akan menerima pembiayaan dari semua program REDD+ di Indonesia

- Sudah dapat dana dari Norway dan BioCarbon di Jambi dan Carbon Fund di Kaltim
- Dana kelolaan BPD LH akan didistribusikan kepada semua beneficiary termasuk masyarakat dan Pemda.
- Semua benefit-sharing mechanism REDD+ wajib disalurkan melalui BPD LH

Perbaikan tata kelola pelan-pelan diperbaiki. Kelembagaan disiapkan lewat BPD LH. Yang melakukan mekanisme NEK tidak hanya BPD LH tapi BPD LH adalah salah satu calon terkuat.





Prinsip dasar NEK (lihat di atas)

- Landasan hukum bagi NDC Indonesia dan instrumen NEK untuk mendukung pencapaian target NDC.
- Panduan tata cara pelaksanaan NEK.
- Koridor untuk menata kembali aktivitas.
- Opsi insentif untuk pemangku kepentingan yang berperilaku positif.
- Landasan hukum pendanaan LH yang inovatif.
- Landasan hukum instrumen keuangan terkait NEK.

The screenshot shows a Zoom meeting interface. The main content is a presentation slide titled "Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon". The slide is organized into seven columns, each representing a chapter (BAB) of the draft regulation. The chapters and their contents are:

- BAB 1 – KETENTUAN UMUM**
  - Definisi dan pengertian (Pasal 1)
- BAB 2 – MAKSUD DAN TUJUAN**
  - Maksud dan tujuan (Pasal 2)
  - Target NDC (Pasal 3)
- BAB 3 – PENYELENGGARAAN**
  - Ruang lingkup (Pasal 4)
  - Tahapan dan sektor penyelenggaraan NEK (Pasal 5-6)
  - Perencanaan NEK (Pasal 7-11)
  - Pelaksanaan NEK (pasal 12-24)
- BAB 4 – PEMENUHAN NDC**
  - Mitigasi Perubahan iklim (Pasal 27-34)
  - Adaptasi perubahan iklim (Pasal 35-40)
- BAB 5 – PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**
  - Pemantauan dan evaluasi (Pasal 41)
  - Pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (Pasal 42-49)
  - Sistem registrasi nasional (Pasal 50)
  - Sertifikasi pengurangan emisi (Pasal 51-55)
- BAB 6 – PENINGKATAN PARTISIPASI PARA PIHAK**
  - Penyediaan informasi, Peningkatan kapasitas, Penghargaan (Pasal 56)
  - **Sumber pembiayaan (Pasal 57)**
- BAB 7 – KET. PERALIHAN DAN PENUTUP**
  - Pengaturan bagi kegiatan NEK yang sudah berjalan sebelum Perpres diterbitkan (Pasal 58-60)

The Zoom interface includes a video feed of a participant in the top right corner, a chat window at the bottom, and a "Leave" button in the bottom right corner.

- Hak atas karbon - pengaturan di-lead KLHK.
- Pembayaran berbasis kinerja (RBP).
- Pembagian manfaat.
- Pungutan atas karbon - jadi domain Kemenkeu.

You are viewing Joko Tri Haryanto-BKF's screen

View Options

File | C:/Users/62817/Desktop/Bahan%20PPT%20NEK%20Madani.pdf

16 of 24

Read aloud | Draw

## Hak atas Karbon (Pasal 1)

### Pasal 1 (18)

- Hak atas karbon adalah penguasaan karbon oleh negara yang dapat dipindahkan kepada usaha dan/ atau kegiatan melalui perizinan atau kepada negara lain melalui otorisasi.

## Pembayaran Berbasis Kinerja (Pasal 20)

- Pembayaran berbasis kinerja dilakukan terhadap kinerja/manfaat pengurangan emisi GRK yang dihasilkan oleh usaha dan/ atau kegiatan.
- Pembayaran berbasis kinerja dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, pelaku usaha/kegiatan, masyarakat dan mitra Internasional.
- Mekanisme Pembayaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan has verifikasi atas capaian pengurangan emisi dan/ atau konservasi/ peningkatan cadangan karbon yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan.
- Pembayaran berbasis kinerja pada lingkup :
  - nasional dapat diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah provinsi/ kabupaten/kota, dunia usaha, unit manajemen dan kelompok masyarakat.
  - internasional dapat diberikan oleh mitra internasional kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dunia usaha, unit manajemen dan kelompok masyarakat atas otorisasi pemerintah.
- Pelaksanaan pembayaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan karbon.

Audio Settings

Chat Raise Hand Q&A Leave

You are viewing Joko Tri Haryanto-BKF's screen

View Options

File | C:/Users/62817/Desktop/Bahan%20PPT%20NEK%20Madani.pdf

19 of 24

Read aloud | Draw

## Possible Roles of BPD LH in Carbon Market

- Domestic CER buyer and seller**, BPD LH implements the framework and criteria established by relevant ministries
  - ✓ **Price stabilizer**, stand-by buyer and seller to maintain a buffer stock (similar to Bulog (National Logistics Agency)).
  - ✓ **Market driver**, BPD LH can drive the domestic carbon market as a buyer and strategic use of Results-Based Payments (RBP) at the early stage of market development
- Gol's broker for selling domestic CERs to the international market**, upon agreement of the government to sell the domestic carbon in international market
- Manage proceeds from carbon penalty, REDD+, RBP:**  
Use the fund for other climate mitigation actions or provide incentives to private sector, sub-national government, and grants to NGOs for their climate change mitigation activities. E.g. similar to Dana Sawit (Palm Oil Fund)

*Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup ("BPD LH) or Environmental Management Fund Agency, is intended to manage and blend environmental funds from various sources:*

- State funds
- Grants from donors
- Taxes and levies.

*Financial instruments for fund distribution can be linked to carbon market, loans, subsidies, grants and others.*

*Focus will be first on climate change / REDD+*

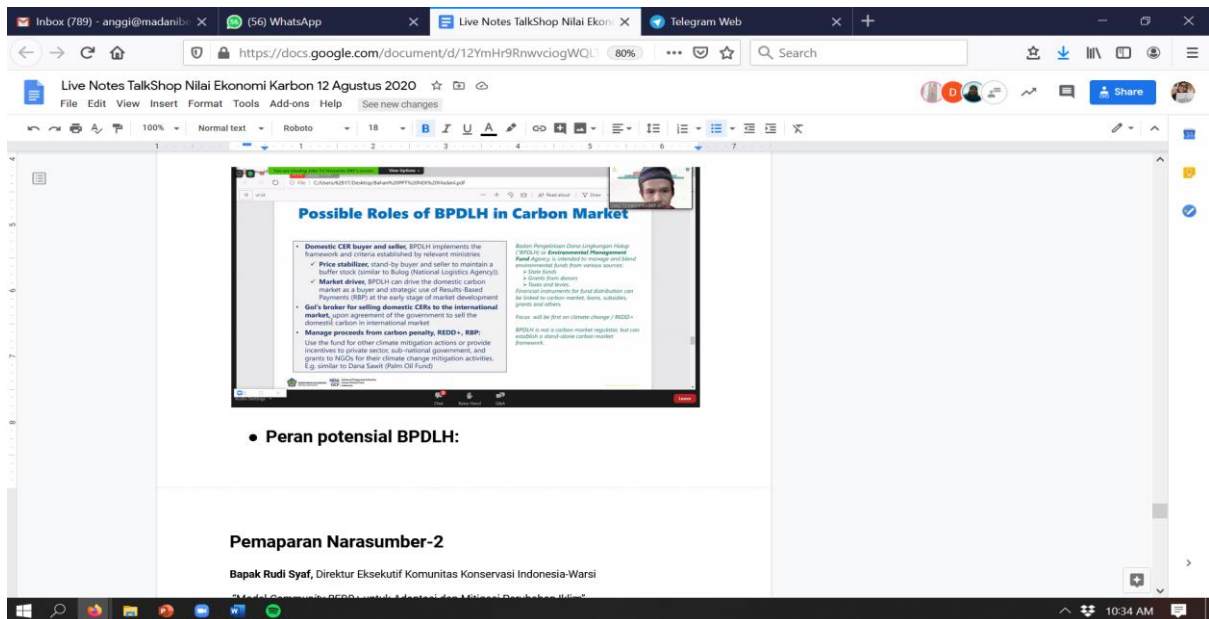
*BPD LH is not a carbon market regulator, but can establish a stand-alone carbon market framework.*

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NDA GCF National Designated Authority Green Climate Fund Indonesia

Audio Settings

Chat Raise Hand Q&A Leave

Peran potensial BPD LH yang diajukan - masih didiskusikan belum bisa dirujuk.



**Perlu didudukan:**

- Peran semua pemangku kepentingan - pemerintah baiknya regulator saja. Operator = BPDHL?
- Penerima manfaat menjadi kata kunci

**Moderator, Gita Syahrani:**

- PR - lebih paham instrumen ekonomi karbon dan peran pemerintah di mana
- Untuk teman-teman yang saat ini sudah menjalankan praktik NEK = tata kelola baru seperti apa?

**Model Community REDD+ untuk Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim**

Rudi Syaf, Direktur Eksekutif Komunitas Konservasi Indonesia-Warsi





Menceritakan pengalaman Warsi terkait pengalaman Community REDD+ atau Community Carbon untuk upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Upaya WARSI untuk mengangkat kegiatan-kegiatan yang sudah ada di masyarakat saat ini yang selama ini tidak terlihat dan tidak mendapat dukungan

## Pengelolaan yang Legal

- PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan
- PERMENHUT 49/ Menhut-II 2008 tentang Hutan Desa
- Lubuk Beringin menjadi hutan Desa pertama di Indonesia

Table Village Forest in Bujung Raba					
No	Village Forest	License No.	Protected Zone	Utilization Zone	Total Area
1	Lubuk Beringin	108/Menhut-II/2009	2,126	230	2,356 ha
2	Senamat Ulu	360/Menhut-II/2011	1,095	566	1,661 ha
3	Sungai Mengkuang	362/Menhut-II/2011	634	417	1,051 ha
4	Sangi Letung Bust	543/Menhut-II/2011	736	487	1,223 ha
5	Sungai Telang	301/Menhut-II/2012	745	255	1,000 ha
<b>TOTAL</b>			<b>5,336</b>	<b>1,955</b>	<b>7,291 ha</b>

Sebelum 2007 masyarakat belum punya kewenangan mengelola hutan. Setelah 2007, terbuka peluang masyarakat untuk mengelola hutan. Pada tahun 2008, keluar Permenhut Hutan Desa. Desa Lubuk Beringin adalah Hutan desa pertama di Indonesia, berada di Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur - Bujung Raba. Sudah ada 5 desa yang mendapatkan izin Hutan Desa di kawasan Bujung Raba ini.

## Tingkat Keteranc... yang Tinggi

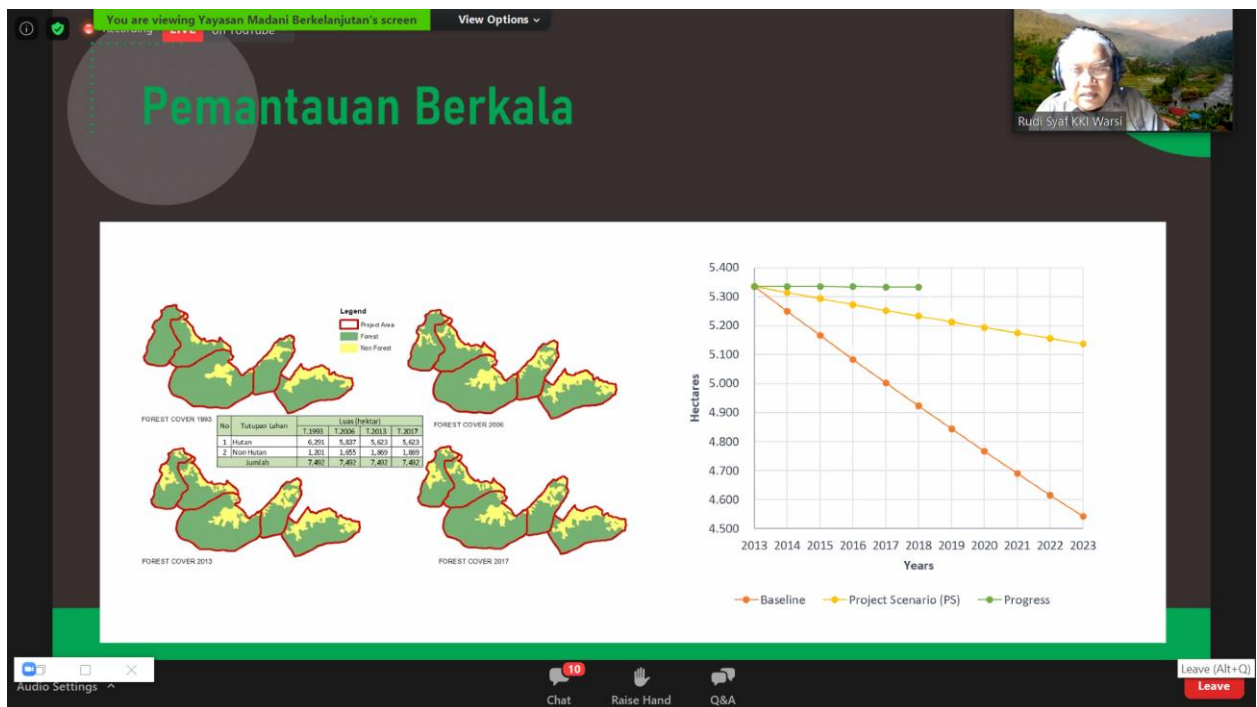
FOREST COVER 1993		FOREST COVER 2013	
Reference area	42,423 hectares	Reference area	42,423 hectares
Forest cover 1993	39,613 hectares	Forest cover 2013	27,396 hectares
Forest cover 2013	27,396 hectares	Deforestation	15,027 hectares
Deforestation	15,027 hectares	% deforestation (baseline)	1.6% per year

- Tekanan dari HTI, perkebunan kelapa sawit dan tambang
- Memaksimalkan manfaat hutan tetapi tetap menjaga
  - Menghubungkan program pemerintah dengan rencana kerja HD
  - Peningkatan perekonomian : Komoditi bertingkat
  - Peningkatan kapasitas
  - Patroli dan pengamanan kawasan
  - Membangun akses pasar produk komunitas



Laju deforestasi di wilayah acuan cukup tinggi - lihat peta. Karena pembukaan untuk Hutan Tanaman Industri dan HGU Sawit. Di dalam Hutan Desa di dalam Hutan Lindung juga terjadi konversi/deforestasi. Itu terjadi SEBELUM masyarakat mendapatkan izin pengelolaan melalui skema Hutan Desa.

Ketika masyarakat mendapatkan izin, masyarakat mulai mengupayakan pengelolaan kawasan Hutan Desa, melakukan patroli, memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, dan akhirnya Hutan Desa bisa dikelola dengan baik.



Terbukti dari tahun 2013 sampai 2018, hutan yang dikelola masyarakat zero deforestasi. Masyarakat mampu membuktikan bahwa ketika mereka diberikan izin atau kewenangan untuk mengelola kawasan hutan lindung dengan skema hutan desa, mereka mampu menjaga hutan tersisa agar tidak lagi dikonversi dalam diambil kayunya.

You are viewing Yayasan Madani Berkelanjutan's screen

# Potensi Carbon Bujang Raba

Rudi Syat KKI Warsi

Year to	Year	Baseline carbon uptake i.e. without project (tCO2eq)	Carbon emissions with project (75%) (tCO2eq)	Potential Carbon Emissions Reductions (tCO2eq)	Potential leakage (5%) (tCO2eq)	Total Carbon Benefit (after leakage deduction) (tCO2eq)	Deduction of 20% risk buffer (tCO2eq)	Net carbon benefit (tCO2eq)
0	2013	0	0	0	0	0	-	-
1	2014	71,439	17,860	53,579	2,679	50,900	10,180	40,720
2	2015	70,296	17,574	52,722	2,636	50,086	10,017	40,069
3	2016	69,171	17,293	51,879	2,594	49,285	9,857	39,428
4	2017	68,065	17,016	51,049	2,552	48,496	9,699	38,797
5	2018	66,976	16,744	50,232	2,512	47,720	9,544	38,176
6	2019	65,904	16,476	49,428	2,471	46,957	9,391	37,566
7	2020	64,850	16,212	48,637	2,432	46,205	9,241	36,964
8	2021	63,812	15,953	47,859	2,393	45,466	9,093	36,373
9	2022	62,791	15,698	47,093	2,355	44,738	8,948	35,791
10	2023	61,786	15,447	46,340	2,317	44,023	8,805	35,218
	<b>Total</b>	<b>645,096</b>	<b>166,313</b>	<b>478,783</b>	<b>24,841</b>	<b>473,942</b>	<b>96,715</b>	<b>377,227</b>
	<b>Annual average</b>	<b>64,509</b>	<b>16,631</b>	<b>47,878</b>	<b>2,484</b>	<b>47,394</b>	<b>9,671</b>	<b>37,723</b>

Audio Settings

Chat Raise Hand Q&A Leave

Masyarakat menghitung kandungan karbon yang bisa diperdagangkan atau didukung dari keberhasilan masyarakat menjaga hutan. Rata-rata 33 ribu ton karbon per tahun dari 2013 sampai 2022.

You are viewing Yayasan Madani Berkelanjutan's screen

# Bonus Hutan Terjaga...

- Membuka chanel lain melalui skema REDD+
- Peran masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
- Barometer perubahan
- Uji coba pasar karbon
- Pengorganisasian distribusi manfaat

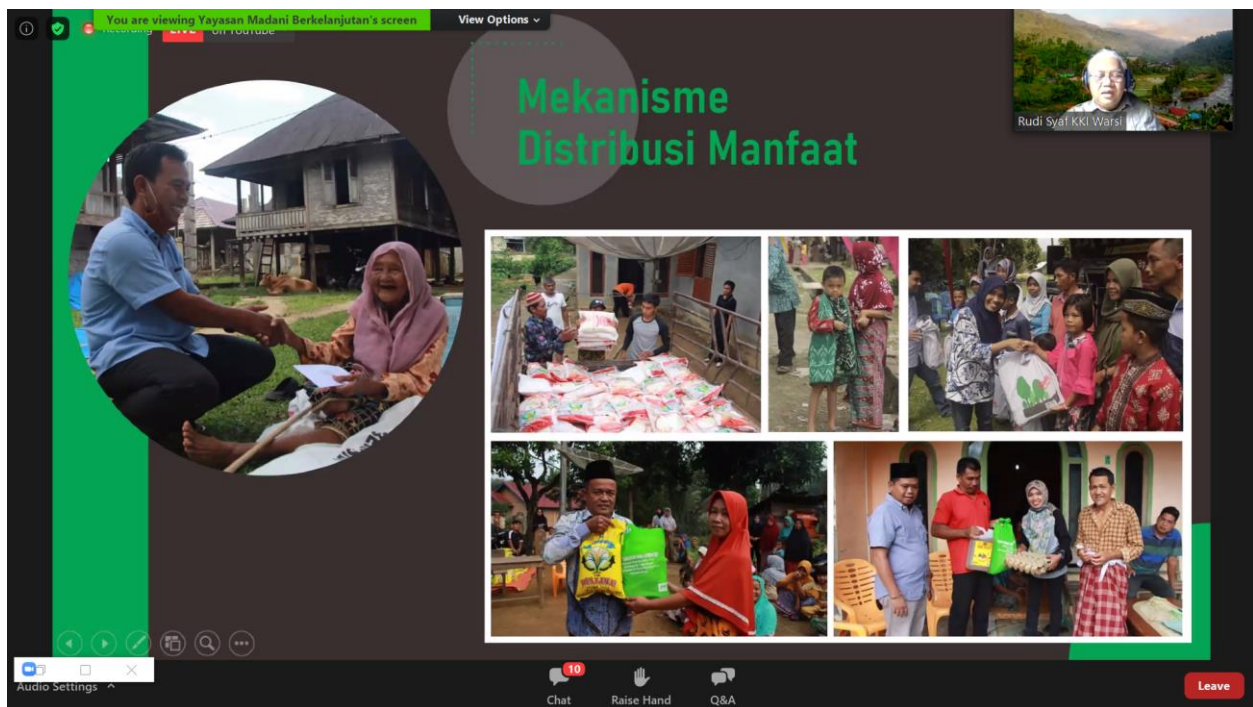
Voluntarily Community P...

1. Identifikasi
2. Project Design Document (2014)
3. Project validation (2015)
4. Annual report (2014-2015)
5. Certified carbon emission (2016)

Audio Settings

Chat Raise Hand Q&A Leave

Kolaborasi dengan Plan Vivo. Membuat project design document. Menempuh sertifikasi dan sudah mendapatkan sertifikat karbon. Ketika masyarakat berhasil menjaga hutan, "bonusnya" adalah membuka pendanaan melalui skema REDD+. Masyarakat terbukti mampu mempertahankan hutannya. Uji coba ke pasar karbon untuk mendapatkan apresiasi.



Di tingkat masyarakat ada diskusi dan musyawarah tentang bagaimana mendistribusikan manfaat yang didapatkan ke 5 desa yang kepentingannya beragam. Respon masyarakat cukup baik, musyawarahnya baik. Masyarakat menyetujui hal-hal terkait pendistribusian manfaat yang akan didapat.

Secara total, manfaat dari karbon dari menjaga hutan dan mencegah emisi yang diterima masyarakat sampai bulan puasa lalu sekitar 1,3 Miliar rupiah - sudah didistribusikan

Kesepakatan masyarakat pembagian manfaat:

- 300 juta digunakan untuk sunatan massal.
- Distribusi sembako kepada seluruh warga desa di 5 desa dengan tidak melihat kaya dan miskinnya (karena Covid membuat harga karet jatuh).
- Pembangunan sarana dan prasarana desa (mesjid dll)
- Untuk pengelola hutan desa: perencanaan, patroli, dan perlindungan kawasan hutan desa.

Menarik - kesepakatan benefit sharing diputuskan sendiri oleh masyarakat - masyarakat menjadi sadar bahwa ketika mereka menjaga hutan mereka akan mendapatkan manfaat langsung. Harus diskusi apakah benefit dari karbon harus 100% kembali ke hutan atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.



You are viewing Yayasan Madani Berkelanjutan's screen

## Dukungan berbagai pihak...

- Perusahaan travelling di Swedia melalui program foundation Charity
- Dukungan Individu yang melakukan perayaan pernikahan di US
- Fundraising untuk pengelolaan hutan di Indonesia oleh Zeromission




Audio Settings

Chat 10 Raise Hand Q&A Leave

- Dukungan dari perusahaan travel di Swedia
- Dukungan dari individu-individu meskipun kecil (contoh 10ton saja seharga 60 dollar) - untuk perayaan pernikahan, ulang tahun, dll - berdasarkan kesadaran individu yang mempolusi karbon akibat naik pesawat terbang dll
- Fundraising oleh Zeromission - membuat film 4D di Bujang Raba dan dibuka sebagai pameran. Orang bisa datang dan serasa berada di dalam hutan. Lalu mereka berdonasi dengan menghitung ton karbon.

You are viewing Yayasan Madani Berkelanjutan's screen

## Pembelajaran...

- Skema PS terbukti mampu mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan capaian target NDC.
- Lokasi PS sebagai sequester perlu mendapatkan insentif yang berikan atas usaha penurunan emisi
- Kedepan, penyelenggaraan program REDD+ komunitas perlu pendampingan teknis sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- Dana Benefit sharing tidak hanya dikembalikan ke pengelolaan kawasan, tapi juga dipergunakan untuk dana social dan peningkatan ekonomi masyarakat.





Audio Settings

Chat 10 Raise Hand Q&A Leave

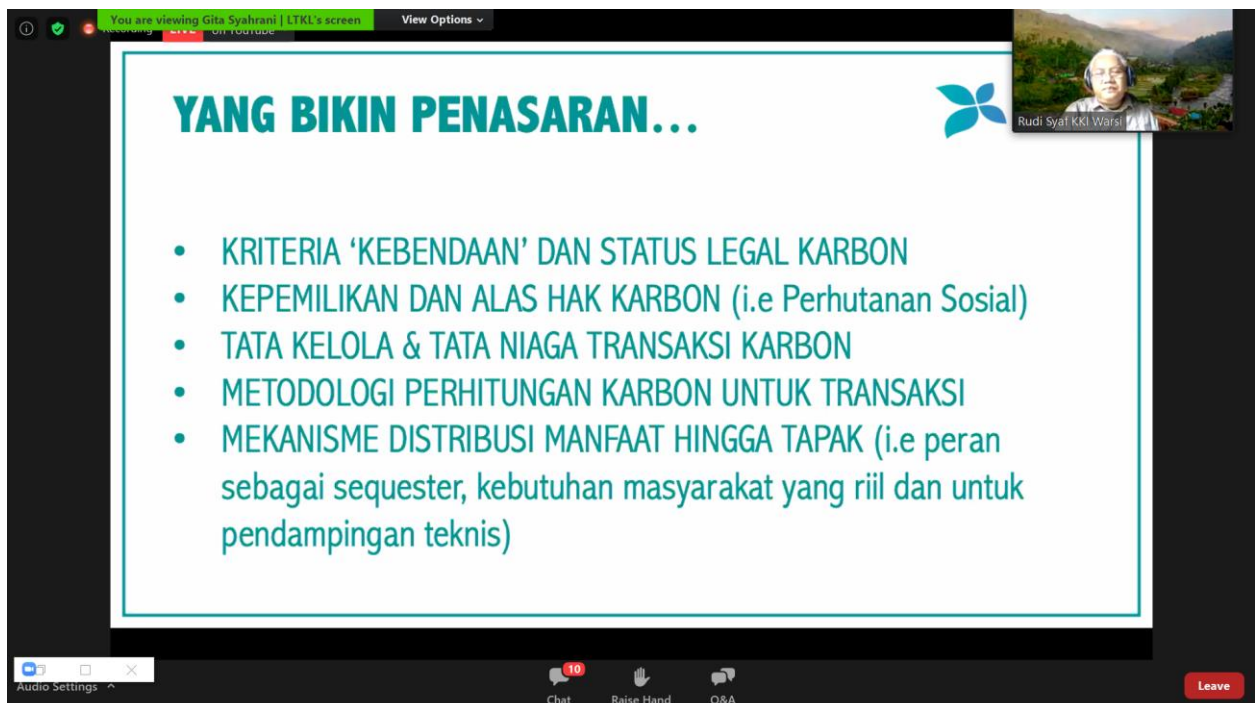
PS terbukti mampu mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. PS sebagai penyerap karbon harus diperhatikan, tidak hanya yang mengemis (emiter) - seperti apa insentif yang bisa diberikan kepada masyarakat melalui instrumen NEK?



Penyelenggaraan program REDD+ di komunitas seperti di Bujang Raba tetap memerlukan pendampingan teknis. Misalnya untuk membuat PDD (Project Design Document). Masyarakat belum mampu membuat PDD secara mandiri. Cukup banyak PS yang kondisinya seperti Bujang Raba tapi belum punya kemampuan untuk masuk ke skema karbon ini. Pendampingan ke depan menjadi penting. Pembagian manfaat harus berdasarkan apa yang menurut masyarakat penting.

**Moderator, Gita Syahrani:**

- Seperti apa kriteria kebendaan dan status legal karbon?
- Bagaimana kepemilikan dan alas hak karbon, misal untuk PS?
- Bagaimana tata kelola dan tata niaga transaksi karbon?
- Bagaimana metodologi perhitungan karbon untuk transaksi?
- Bagaimana mekanisme distribusi manfaat hingga tapak?



The image is a screenshot of a Zoom meeting. At the top, it says "You are viewing Gita Syahrani | LTKL's screen". The main content is a slide with the title "YANG BIKIN PENASARAN..." in large blue letters. Below the title is a list of five bullet points in blue text: "KRITERIA 'KEBENDAAN' DAN STATUS LEGAL KARBON", "KEPEMILIKAN DAN ALAS HAK KARBON (i.e Perhutanan Sosial)", "TATA KELOLA & TATA NIAGA TRANSAKSI KARBON", "METODOLOGI PERHITUNGAN KARBON UNTUK TRANSAKSI", and "MEKANISME DISTRIBUSI MANFAAT HINGGA TAPAK (i.e peran sebagai sequester, kebutuhan masyarakat yang riil dan untuk pendampingan teknis)". In the top right corner of the slide, there is a small video thumbnail of a man with glasses, identified as "Rudi Syah KKI Warsi". At the bottom of the Zoom window, there are icons for "Audio Settings", "Chat" (with a red notification bubble showing "10"), "Raise Hand", "Q&A", and a red "Leave" button.

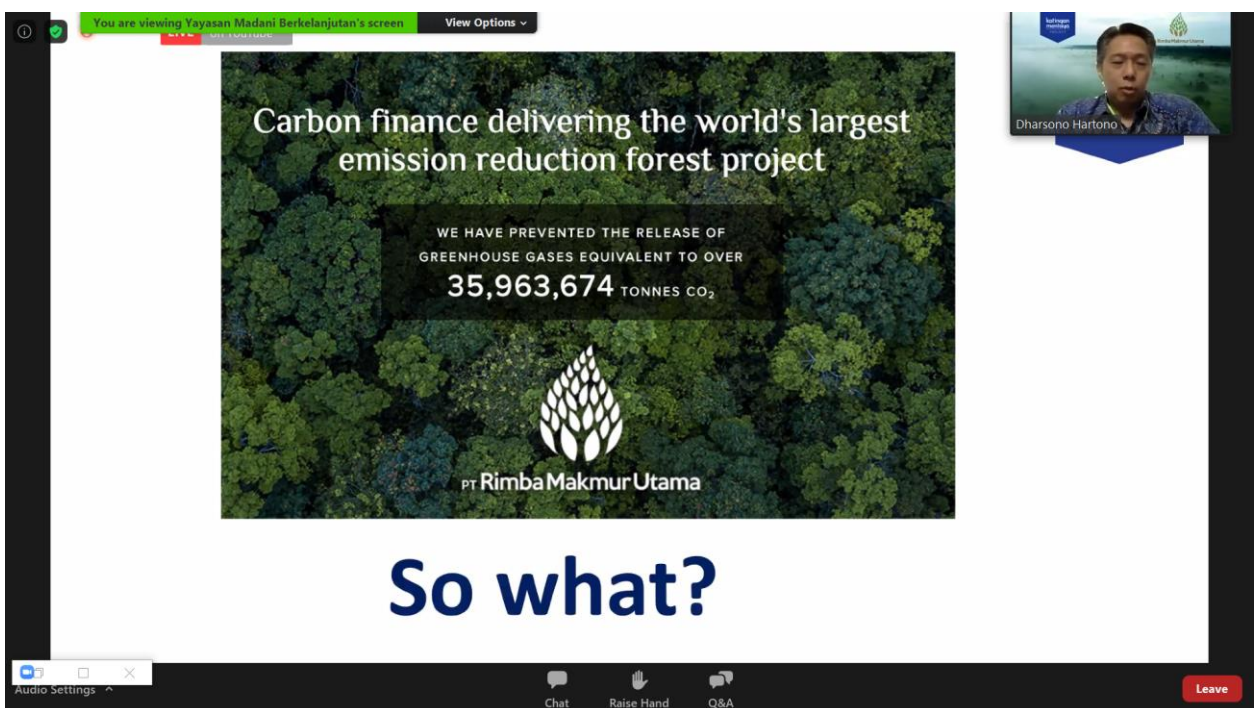
## **Bagaimana Perspektif pelaku usaha terhadap instrumen Nilai Ekonomi Karbon**

Dharsono Hartono, President Director PT Rimba Makmur Utama (RMU)

1. Restorasi dan konservasi hutan dan gambut di Kalteng
2. sudah dapat sertifikasi karbon = 200 ribu hektare.
3. Izinnya RE 157 ribu ha. Di luarnya bekerja sama dengan masyarakat.



Perusahaan kami sudah berhasil mencegah emisi 35 juta ton, tapi *so what?*



Untuk dapat sertifikasi karbon, prosesnya sangat panjang. Produk kami jasa lingkungan. Kami harus bisa mencapai 3 hal: permanensi, additionality atau nilai tambah, tidak ada leakage. Ada yang namanya leakage atau tidak pindah emisinya ke tempat lain. Masyarakat harus dijaga agar tidak pindah dan mendeforestasi ke tempat lain. Artinya: bisnis ini harus mendudukan masyarakat setara dengan perusahaan. Bisnis ini sangat inklusif. Masyarakat menjadi penting.

You are viewing Yayasan Madani Berkelanjutan's screen

**katingan mentaya**  
PROJECT

Since the land dictates the rules, we encourage local project developers their projects for an area with the following characteristics: The land need minimum perimeter — while size is relative, the smaller the more managed will be easier to monitor threats (e.g., logging, forest fires, etc.) effectively communities need to be involved in the project development process. This means that positive impact is sustainable — their communities get stable jobs that decrease destruction of their local natural resources. This could be encouraging the use of stoves that consume less charcoal and can be locally produced.

**HARUS DAPAT DILAKUKAN DAN BERMANFAAT UNTUK MASYARAKAT..**

Dharsono Hartono

Audio Settings Chat Raise Hand Q&A Leave

Land dictates the rule - gambut lebih baik dikonservasi tapi harus bermanfaat untuk masyarakat. Yang sangat sulit didapatkan perusahaan adalah kepercayaan. Yang dibangun adalah social capital dari awal. Kepercayaan adalah Kunci = prinsip dasar yang harus dijaga. Yang harus mendapatkan manfaat adalah masyarakat agar proyek bisa berhasil. *Land Dictates the Rule, Community is the Gatekeeper.*

You are viewing Yayasan Madani Berkelanjutan's screen

**katingan mentaya**  
PROJECT

**KAMI  
MULAI  
SEJAK  
TITIK  
NOL.**

**KEPERCAYAAN ADALAH KUNCI..**

Dharsono Hartono

Audio Settings Chat Raise Hand Q&A Leave

Mengubah cara pandang dan perilaku di tingkat masyarakat dan pemerintah tidak gampang jika tidak ada hasil. Harus bisa mencegah kebakaran, deforestasi, dan mensejahterakan masyarakat. Kami langsung turun ke lapangan, ke desa-desa, untuk berkonsultasi dengan masyarakat.



Bisnis ini ada *purpose*-nya. Kita mencegah perubahan iklim dan bisa inklusif. Salah satu yang ingin kita ubah adalah kebiasaan petani membakar lahan. Caranya kami membuka sekolah agroekologi dan hasil masyarakat kita beli. Dibandingkan 13 tahun yang lalu sekarang dunia bergerak ke arah yang lebih lestari. Orang sudah mengerti bahwa keberlangsungan hidup manusia bergantung pada alam dan kita harus memberikan nilai pada alam. REDD+ sekarang jadi Nature Based Solution. Offset sudah tidak lagi tabu.

## Sesi Tanya Jawab

**katingan mentaya PROJECT**

**CLIMATE**

- +450 LOCAL PEOPLE**  
protect the forest from seasonal fires
- AUTOMATED FIRE MONITORING**  
updates our fire teams every 8 hours
- 18 FIRE POSTS**  
enable fast and effective response with specialised equipment to directly target underground peat fires
- AT 26,000 YEARS OLD**  
the peat soils under the forest are up to 13 meters deep

**PEOPLE**

- OVER 400 LOCAL PEOPLE**  
protect the forest from seasonal fires
- LOCALLY GROWN ORGANIC FOOD**  
we aim to make sure all staff meals are sustainably sourced
- REDUCING CONTAMINATION OF RIVER WATER**  
26 river latrines are being replaced with land based latrines
- OVER 500 WOMEN AND MEN**  
directly employed by the project

**BIODIVERSITY**

- 67 MAMMAL SPECIES**
- 167 BIRD SPECIES**
- 45 REPTILE SPECIES**
- 111 FISH SPECIES**
- 314 PLANT SPECIES**

**DUNIA BERGERAK LEBIH LESTARI...**

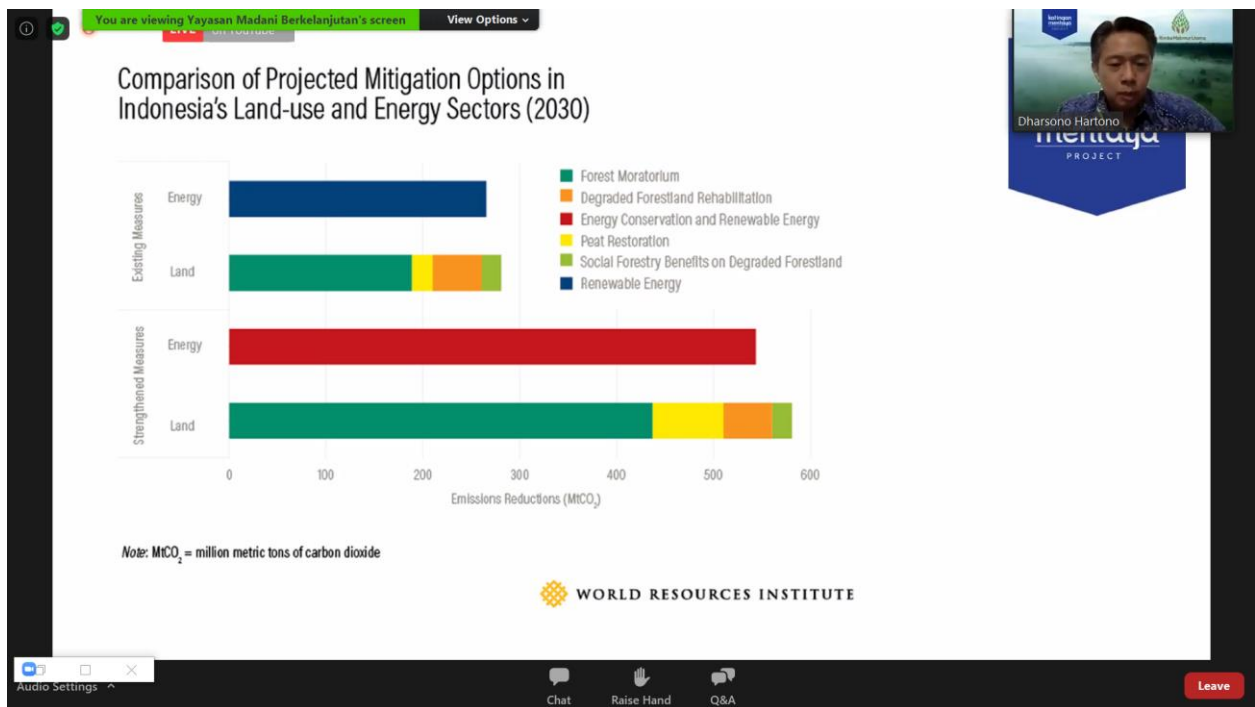
**DOING GOOD INDEX 2020**  
Profiling Asia's Social Sectors: The Path Forward  
Executive Summary

**SKOLSTREJK FOR KLIMATET**

**carbon footprint**

- Harry and Meghan's flights have pumped out 7 tonnes of CO<sub>2</sub>
- Sir Elton says he has contributed to an offset scheme
- Carbon Footprint carry out carbon offset projects including planting trees
- It could take a single tree around 320 years to absorb all 7,000kg of CO<sub>2</sub> from their flights





- Potensi uang yang bisa didapat 3 miliar dollar untuk 600 juta ton
- Indonesia harus menjadi pemimpin. SDA yang ada bisa menjadi aset yang luar biasa untuk dunia. Karhutla menjadi permasalahan, tapi ini momen untuk berubah.
- Dalam 10 tahun karhutla bisa dicegah dan kita bisa dibayar negara-negara maju.

You are viewing Yayasan Madani Berkelanjutan's screen

### EKONOMI LESTARI : WE GOT ONE SHOT ON THIS !

- MEKANISME PASAR YANG KREDIBEL DAN BERINTEGRITAS
- FASILITASI EKOSISTEM KONDISI PEMUNGKIN
- PAYUNG HUKUM YANG JELAS DAN MENGAYOMI
- KOMITMEN PADA 'TRIPLE BOTTOM LINE' UNTUK RAKYAT
- INTEGRASI DALAM PERENCANAAN JANGKA PANJANG

Audio Settings | Chat | Raise Hand | Q&A | Leave

- Kita hanya punya satu kesempatan= One Shot
- Perlu mekanisme pasar yang kredibel dan berintegritas = maksudnya apa?
- Fasilitasi ekosistem kondisi pemungkin
- Payung hukum yang jelas dan mengayomi - jangan limited
- Komitmen pada triple bottom line untuk rakyat

- Perlu ada integrasi dalam perencanaan jangka panjang
- Kami belum dapat insentif, masih bayar semua pajak

### **Apakah ada insentif untuk *private sector* yang riil?**

- Yang disasar RMU dan perusahaan adalah insentif pajak: PPh - 25, 21, atau 22?
- Masalahnya adalah masih ada information lag. Orang-orang di perpajakan belum paham tentang restorasi ekosistem. Ini adalah sesuatu yang baru bagi teman-teman perpajakan.
- BKF akan memfasilitasi diskusi bersama tentang insentif perpajakan.
- Ketika Pemda sudah melakukan pembayaran jasa lingkungan (PES), ada persoalan juga. Sama halnya dengan isu pengelola sampah.
- Dalam PES, ada dana kelolaan yang masuk dalam APBD dan mekanisme PAD lain-lain. PAD lain-lain belum mengenali nomenklatur pendapatan dari PES/jasa lingkungan. Yang bisa membuka kunci nomenklatur ini adalah Kemendagri.
- Model bisnis Jasa Lingkungan akan memberikan aliran dana yang begitu besar bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, harus diperbaiki dulu tata kelolanya sekarang.
- Di daerah, akan lebih baik jika bisnis jaring hubungannya business to business. Pemda membuat mekanisme BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) atau yang lain agar uangnya tidak dicatatkan di APBD. Karena kalau dana masuk ke APBD akan sulit dikeluarkan kembali karena harus ikut sistem anggaran tahunan, dibahas Dewan dll.
- Tata kelebagaannya harus diperbaiki dulu. Dijadikan saja sebagai SVP = special purpose vehicle misalnya BLUD untuk menjadi driver bisnis jasa lingkungan.
- Contoh: Desa Pongo = desa wisata di Klaten, Yogyakarta. Bisnisnya adalah jasa lingkungan (wisata). Model tata kelebagaan adalah BUMDES. Sekarang mereka mengajari semua BUMDES di Indonesia = menjadi pola bisnis baru.

### **Aturan tentang hak atas karbon?**

- KLHK yang harusnya menjawab - bukan kewenangan Kemenkeu.
- Pengelolaan hak atas karbon dan NEK dikuasai, dilindungi negara dan diatur oleh pemerintah.
- Penting bagi daerah menyiapkan kendaraan khusus agar bisa mendapatkan, mengelola, dan menyalurkan pendanaan atau pendapatan dari jasa lingkungan. Bentuknya bisa Special Purpose Vehicle misal BLUD
- Yang harus dijagain - bagaimana Pemda melakukan distribusi manfaat.

### **Offset?**

- Ada pengaturan *cap and trade*
  - Akan ada sektor-sektor yang dibatasi emisinya
  - Bisa offset - akan ada pembatasan agar mendukung transisi ke rendah karbon.
- *Carbon trading*.
- RBP
- Pungutan atas karbon.

**R-PERPRES dikembangkan dalam narasi politik sumber daya alam dan lingkungan Indonesia dalam relevansi subyek tentang *climate change* :**

1. Perubahan iklim mempunyai pengaruh terhadap lingkungan bagi manusia yang harus dilindungi hak konstusionalnya (Pasal 28 H UUD 1945) dan karbon merupakan bagian dari kekayaan alam Indonesia dan harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia (Pasal 33 UUD 1945)
2. Angka karbon (emisi) merupakan ukuran kinerja universal (dunia) dalam pengelolaan perubahan iklim yang merefleksikan tingkat keberhasilan negara dalam mengendalikan perubahan iklim. Oleh karenanya hak atas karbon dan nilai ekonomi karbon harus dikuasai, dilindungi dan dikelola oleh negara dan diatur Pemerintah Indonesia (**Carbon sebagai constitutional rights**)
3. Nilai ekonomi karbon timbul dari upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha/kegiatan, maupun masyarakat (**Pengelolaan carbon sebagai management/operation rights**).
4. Pengelolaan nilai ekonomi karbon, mitigasi dan adaptasi harus mendukung pencapaian sasaran komitmen Indonesia pada pengurangan emisi GRK dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang memberikan kemakmuran bagi rakyat (**pemanfaatan secara ekonomi dari karbon economic rights**).

### ***Pertanyaan untuk WARSI***

#### ***Kenapa pilih Plan Vivo untuk Bujang Raba?***

- Community carbon hanya disupport Plan Vivo. VCS tidak support community carbon karena luasannya kecil. Luasnya cuma 7000 ha. Total karbonnya cuma 33 ribu ton per tahun.
- Lebih sederhana dan mudah persyaratannya.

#### ***Prosesnya bagaimana?***

- Warsi menghitung stok karbon bersama masyarakat dengan metode sederhana = rapid carbon stock assessment yang dikembangkan ICRAFT
- Diverifikasi Plan Vivo dan dinilai layak (mengambil sampling ke lapangan)
- Keluar angka stok karbon dan tabel harga yang disepakati Plan Vivo
- Total biaya sertifikasi dan verifikasi hanya sekitar 4500dollar sedangkan harga 6 dollar/ton

#### ***Bagaimana menjamin masyarakat betul-betul dapat manfaat?***

- Musyawarah

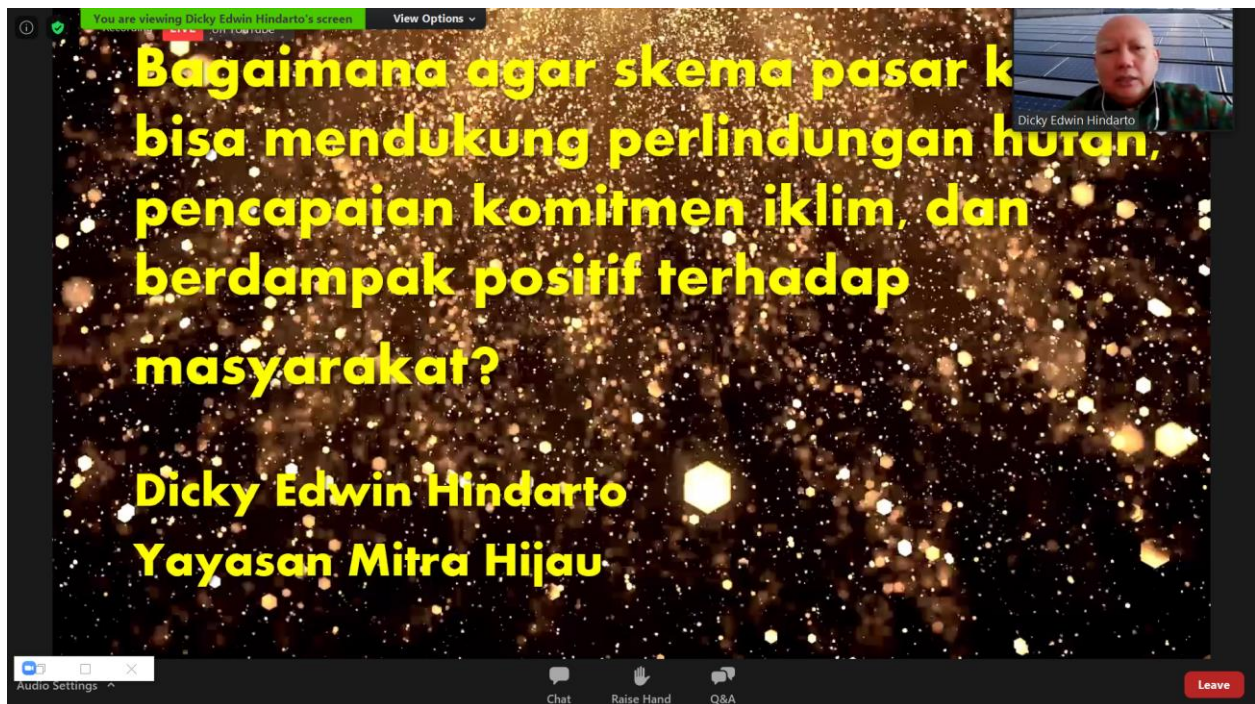
#### ***Apakah ada pembeli dari Indonesia***

- Belum ada pembeli karbon dari Indonesia, tapi proses menuju ke sana Sudah ada teman-teman yang menghitung jejak karbon dari pesawat dan sudah mulai berpikir harus diganti



Bagaimana agar skema pasar karbon betul-betul bisa mendukung perlindungan hutan, pencapaian komitmen iklim, dan berdampak positif terhadap masyarakat?

Dicky Edwin Hindarto, Yayasan Mitra Hijau



Mekanisme ini sudah 13 tahun yang lalu, sama sekali bukan barang baru. Bicara perubahan iklim sudah COP 25.



Model pendanaan perubahan iklim ada pasar dan non pasar dan campuran. Yang menarik, harus diukur, dilaporkan, dan diverifikasi dan dihitung dalam bentuk ton emisi karbon. Masuk pasar atau tidak harus di-MRV karena itu bukti mengurangi emisi.

**Percapaian pembiayaan NDC berbagai negara**

Secara internasional, sudah 193 INDC dan 169 first NDC dikirimkan. Sampai sekarang 175 negara termasuk Indonesia telah melakukan ratifikasi Paris Agreement. Dari seluruh NDC yang dikirimkan, **103 negara menyatakan akan menggunakan mekanisme berbasis pasar untuk mencapai target penurunan emisinya.**

**“Saat ini ada 37 jenis mekanisme berbasis pasar yang beroperasi di dunia, termasuk di US”**

Sumber: #PasarKarbon

Sumber: IGES Japan

175 negara sudah ratifikasi PA - 169 sudah kirim NDC pertama - 103 negara akan pakai mekanisme pasar untuk mencapai target NDCnya. Sudah ada 37 jenis mekanisme berbasis pasar yang beroperasi di dunia. Tidak harus jualan karbon tapi menggunakan kaidah dan infrastruktur pasar untuk mengurangi emisi.

**Mekanisme Berbasis Pasar**

**International**

- Mandatory**
  - CDM Clean Development Mechanism
  - ETS (EU-China Emissions Trading System, NZ ETS)
- Voluntary**
  - VCS Verified Carbon Standard
  - Gold Standard (Climate Security & Sustainable Development)
  - Plan Vivo

**Domestic**

- Initiatives under development**
  - ICER (Indonesia Certified Emission Reduction)
  - BPD LH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup)
  - T-VER



You are viewing Dicky Edwin Hindarto's screen View Options

## Kegiatan yang telah dilakukan di Indonesia

### CDM (Clean Development Mechanism)

- CDM adalah mekanisme pasar di bawah Protokol Kyoto UNFCCC, dimana negara berkembang diperbolehkan melakukan penjualan karbon kredit ke negara Annex 1 (negara maju minus US) di bawah perjanjian Kyoto Protocol.
- Jumlah proyek Indonesia yang terdaftar di UNFCCC : **147 proyek**.
- Jumlah proyek Indonesia yang sudah menerbitkan kredit karbon **49 proyek** dengan jumlah kredit karbon **34.345.675 ton CO<sub>2</sub>**.
- Indonesia sudah tidak memiliki proyek baru lagi sejak 2012 karena negara Annex I hanya akan membeli kredit karbon kepada negara miskin pada periode 2 Kyoto Protocol.
- Harga karbon kredit di pasar berkisar **3-7 USD per ton CO<sub>2</sub>**.



Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Darajat adalah salah satu proyek CDM Indonesia yang menerbitkan kredit lebih dari 1 juta ton CO<sub>2</sub> per tahun sejak 2010. Indonesia memiliki 7 proyek CDM berjenis pembangkit listrik panas bumi.


Chat Raise Hand Q&A Leave

You are viewing Dicky Edwin Hindarto's screen View Options

## Kegiatan yang telah dilakukan di Indonesia

### JCM (Joint Crediting Mechanism)

- Kerjasama bilateral antara dua negara, yaitu **Jepang dan 17 negara tuan rumah**. Saat ini koordinasi JCM di Indonesia ada di bawah Kemenko Perekonomian, dengan 6 kementerian lain terlibat sebagai anggota JC.
- Total **39 proyek**, **12 proyek** telah menerbitkan karbon kredit
- Total investasi **130 juta US\$**, dengan rincian 51 juta US\$ adalah subsidi pemerintah Jepang dan 79 juta USD adalah investasi swasta Indonesia.
- Karbon kredit yang diterbitkan **tidak untuk diperjualbelikan** dan hanya untuk memenuhi kebutuhan pengurangan emisi kedua negara.
- **Jumlah kredit karbon yang telah diterbitkan: 56.524 ton CO<sub>2</sub>**.



Proyek JCM di PT. Fajar Surya Wisesa berhasil **mengurangi konsumsi listrik sekitar 10%** dalam produksi kardus dengan mengimplementasikan teknologi dari Jepang yang sangat efisien sehingga dapat berkontribusi pada penurunan emisi CO<sub>2</sub> sebesar 16.177 ton CO<sub>2</sub> per tahun.

Chat Raise Hand Q&A Leave

You are viewing Dicky Edwin Hindarto's screen View Options

## Kegiatan yang telah dilakukan di Indonesia

### VCS (Verified Carbon Standard)

- VCS adalah skema perdagangan karbon antara pelaku bisnis, di mana salah satu pihak melakukan proyek penurunan emisi sementara pihak lain membeli karbon kredit untuk melakukan "offsetting" kegiatannya.
- Total **14 proyek** telah menggunakan skema VCS.
- Jumlah kredit karbon yang telah diterbitkan: **14.378.257 ton CO<sub>2</sub>**. Harga karbon kredit di pasar berkisar **3-75 USD per ton CO<sub>2</sub>**.
- Proyek-proyek VCS di Indonesia sangat diminati oleh pihak swasta pengembang proyek REDD+ dan aforestasi, termasuk energi terbarukan.

Proyek konservasi hutan yang dilakukan oleh PT. Rimba Makmur Utama di Katingan Kalimantan merupakan proyek VCS berbasis hutan terbesar di dunia



Chat Raise Hand Q&A Leave



Di sektor kehutanan, yang paling gampang adalah Plan Vivo. Tapi ada juga VCS. Di sektor hutan dan lahan harga karbon bisa sampai 75 dollar. Potensi pendapatan bisa 75 juta dollar/tahun.

**Contoh implementasi proyek mekanisme berbasis pasar un**



Proyek VCS restorasi ekosistem yang dilakukan PT. Rimba Raya di **Katingan Kalimantan Tengah** di area seluas **149.800 hektar** mempunyai potensi penurunan emisi **7.451.846 ton CO2 per tahun selama 60 tahun**. Serapan karbon per hektar per tahun: **49.7 ton CO2/hektar**. Potensi pendapatan: **74,5 juta USD per tahun**.

Proyek VCS reforestasi mangrove Yayasan Gajah Sumatra di Aceh dan Sumatra Utara di area seluas **5.000 hektar** mempunyai potensi penurunan emisi **124.706 ton CO2 per tahun**. Serapan karbon per hektar per tahun: **24.9 ton CO2/hektar**. Potensi pendapatan: **1,25 juta USD per tahun**.

Proyek VCS restorasi ekosistem yang dilakukan PT. Rimba Raya Conservation dan Infinite Earth di **Seruyan Kalimantan Tengah** di area seluas **65,000 hektar** mempunyai potensi penurunan emisi **4,393,291 ton CO2 per tahun**. Serapan karbon per hektar per tahun: **67.6 ton CO2/hektar**. Potensi pendapatan: **43,9 juta USD per tahun**.

**tantangan implementasi mekanisme berbasis pasar pos**



**Pemenuhan standar internasional dan**

- hanya proyek setelah 2020 yang bisa masuk
- international MRV, pilots, standards, dan registry
- corresponding adjustment dan ITMOs development
- linking systems dan NDC fulfillment
- hot air dan zero sum games avoidance
- transparency, accountability, dan no double counting, etc.

**Pembangunan pasar karbon domestik:**

- kebijakan dan aturan dasar
- model pendanaan dan transaksi
- infrastruktur pasar, MRV, dan ujicobanya
- pemenuhan target serta linking NDC dan azas kemanfaatan untuk masyarakat dan negara.

Pemenuhan target NDC dan asas kemanfaatan untuk masyarakat dan negara menjadi penting dalam membangun pasar karbon domestik.

You are viewing Dicky Edwin Hindarto's screen

**Dijelaskan bahwa untuk memenuhi target dan kebutuhan di d**

**Pandemi yang terjadi secara global dan sampai sekarang masih belum berakhir, mempengaruhi semua rencana dan target pembangunan mekanisme berbasis pasar. Contohnya adalah CORSIA dan beberapa ETS.**

**Kondisi yang akan terjadi post-pandemic**

- penurunan emisi yang diakibatkan oleh penurunan ekonomi
- hot air akan banyak terjadi, terutama pada negara yang target penurunan emisinya rendah
- banyak negara mendorong terjadinya "green recovery", sehingga additionality tidak terjadi
- penundaan banyak implementasi target RE 100
- **corresponding adjustment** dan pemenuhan kewajiban domestik akan menjadi salah satu tantangan utama
- pemerintah harus memilih mekanisme apa yang harus dijalankan untuk tetap dapat memenuhi komitmen penurunan emisi, termasuk implementasi mekanisme pasar.

**Internasional**

**Domestik**

Dicky Edwin Hindarto

Audio Settings

Chat Raise Hand Q&A Leave

CORSIA pasar karbon penerbangan akan susah karena Covid penerbangan ambruk. Proyek karbon harus dapat dukungan dari masyarakat. Kalau tidak *sustainability* akan diragukan dan harga akan turun dan bisnis akan ambruk.

## Apa saja isu-isu prioritas masyarakat sipil terkait instrumen Nilai Ekonomi Karbon?

Nadia Hadad, Direktur Pengembangan Strategis Yayasan Madani Berkelanjutan

You are viewing Yayasan Madani Berkelanjutan's screen

**Iklim, Hutan dan Masyarakat dalam Pusaran Nilai Ekonomi Karbon: Sekelumit Perspektif Masyarakat Sipil**

NADIA HADAD  
DIREKTUR PENGEMBANGAN STRATEGIS  
MADANI BERKELANJUTAN

CO<sub>2</sub> \$ PER TON

@madaniberkelanjutan.id @yayasanmadani Madani Berkelanjutan www.madaniberkelanjutan.id

Nadia Hadad

Audio Settings

Chat Raise Hand Q&A Leave

You are viewing Yayasan Madani Berkelanjutan's screen

# Apa yang perlu dipastikan?

- Transisi Secara Cepat ke Ekonomi Rendah Karbon
- Terjadi Pengurangan Emisi Secara Aktual
- Hutan Alam dan Keanekaragamannya terlindungi
- Masyarakat menjadi Subjek

@madaniberkelanjutan.id @yayasanmadani Madani Berkelanjutan www.madaniberkelanjutan.id

Audio Settings Chat Raise Hand Q&A Leave

Menurut Madani, ada 4 hal yang perlu dipastikan dalam aturan Nilai Ekonomi Karbon:

- Transisi cepat ke ekonomi rendah karbon
  - Bagaimana agar NEK tidak mengganggu industri tinggi karbon yang akan menghalangi proses transisi ke ekonomi rendah karbon
  - Contoh kasus: British Petroleum pledge akan mengurangi produksi minyak dan gas bumi sebesar 40%. Yang lain belum tentu punya kesadaran yang sama. Perlu pemicu, salah satu caranya bisa dengan mengatur nilai ekonomi karbon.
- Pengurangan emisi secara aktual
  - Jangan ada *hot air*.
- Hutan alam dan keanekaragaman hayati terlindungi.
- Masyarakat menjadi subjek bukan objek.

You are viewing Yayasan Madani Berkelanjutan's screen

# Isu yang Berkaitan dengan Kebijakan Nilai Ekonomi Karbon

- Landasan Hukum Nationally Determined Contribution (NDC)
- Transisi Cepat ke Pembangunan Rendah Karbon
- Perlindungan Hutan, Keanekaragaman Hayati, dan Masyarakat

@madaniberkelanjutan.id @yayasanmadani Madani Berkelanjutan www.madaniberkelanjutan.id

Audio Settings Chat Raise Hand Q&A Leave



Ada tiga isu spesifik terkait aturan NEK yang disoroti Madani:

- NDC butuh landasan hukum yang kuat dan jelas
  - Bagaimana dengan rencana Perpres NDC?
  - Kalau Perpres NEK jadi landasan hukum NDC, apakah NDC hanya dijalankan jika ada nilai ekonominya, padahal NDC sudah merupakan kewajiban?
- NEK harus mendorong transisi cepat ke pembangunan rendah karbon
  - Bagaimana alokasi batas atas emisi per sektor?
  - Bias regulator versus buyer?
- Hutan, keanekaragaman hayati dan masyarakat harus tetap terlindungi
  - Harus ada *safeguards* tertulis
  - Harus ada *safeguards* selain untuk REDD+

## Cerita dari Kampung

Jamris, Perwakilan Komunitas Pengelola Hutan dari Rio Laman Panjang, Kabupaten Bungo



Perlu diketahui bahwa masyarakat kami (Rio Laman Panjang) sangat tergantung pada hutan. Pada awalnya masyarakat tidak tahu itu hutan apa, hutan lindung, produksi, atau APL. Yang diketahui masyarakat adalah bagaimana mengelola dan mendapat manfaat dari hutan tersebut, baik kayu, non kayu, sungai, dll. Masyarakat tidak punya hak akses apa-apa terhadap hutan lindung. Masyarakat memilih hutan lindung tersebut dikelola dengan skema hutan desa.

Banyak manfaat hutan desa yang dirasakan masyarakat

- Sumber air terjaga, menjadi sumber pengairan pertanian, sawah, dll.
- Ekowisata - terjaganya air terjun dan wisata sungai dan pendidikan ikan secara alam
- MCK dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK)
- Imbal jasa lingkungan, yang membuat masyarakat merasakan pentingnya menjaga hutan. Masyarakat merasakan manfaatnya.

Proses - difasilitasi Warsi

- Sosialisasi. Tahun 2013, sosialisasi bersama Warsi, Survey
- Identifikasi potensi hutan desa
- Penyusunan dokumen proyek (PDD)
- Proses diskusinya partisipatif sampai

Tahun 2018 ada yang membeli karbon meski belum begitu besar, didiskusikan bersama Warsi secara partisipatif

Dana karbon dipakai masyarakat untuk:

- Melindungi hutan desa
- Peningkatan kapasitas kelembagaan: pelatihan budidaya kopi, karet
- Peralatan: GPS, laptop, dll
- Paket pendidikan: beasiswa, perlengkapan sekolah - dibagikan merata kepada masyarakat
- Kesehatan: sunat massal, beli masker
- Tunjangan untuk lansia dan masyarakat yang cacat/tidak produktif.

Melakukan musyawarah masyarakat yg difasilitasi oleh Warsi. Pada awalnya masyarakat tidak tahu di sini apa itu nilai karbon. Tapi akhirnya saat ada Warsi untuk fasilitasi, akhirnya kami sedikit demi sedikit ngerti lewat sosialisasi itu. SDM di sini kami sangat terbatas. 2016 bersama Warsi. Diskusinya partisipatif. Kami msh memanfaatkan dana karbon itu bersama masyarakat di sini.

The image is a screenshot of a Zoom meeting slide. At the top, it says "You are viewing Gita Syahrani | LTKL's screen" and "View Options". The slide content is as follows:

**YANG BIKIN PENASARAN...**

- KRITERIA 'KEBENDAAN' DAN STATUS LEGAL KARBON
- KEPEMILIKAN DAN ALAS HAK KARBON (i.e Perhutanan Sosial)
- TATA KELOLA & TATA NIAGA TRANSAKSI KARBON (i.e Prosedur)
- METODOLOGI PERHITUNGAN KARBON UNTUK TRANSAKSI
- MEKANISME DISTRIBUSI MANFAAT HINGGA TAPAK (i.e peran sebagai sequester, kebutuhan masyarakat yang riil dan untuk pendampingan teknis)
- ALOKASI AMBANG BATAS EMISI (Termasuk ketentuan Offset)
- REFERENSI TARGET (NDC) DAN BASELINE
- PRIORITAS LOKASI DAN STATUS LAHAN
- PROJECT DEVELOPER vs DAMPAK INDUSTRI (i.e Fossil Fuel, Agriculture)

The LTKL logo is in the top right corner, with the text "Langkah Tama Kabupaten Lestari" below it. The Zoom interface at the bottom shows "Audio Settings", "Chat", "Raise Hand", "Q&A", and a "Leave" button.

### Pertanyaan untuk Pak Dharsono Rimba Makmur Utama

Plan Vivo versus skema lainnya, mana yang lebih ramah masyarakat? Apa bedanya antara Plan Vivo, VCS, Gold Standard?

- Plan Vivo vs VCS.

VCS lebih banyak untuk swasta. Sertifikasi lebih detil, lebih susah, dan biaya lebih mahal. Plan Vivo langsung ke komunitas Manfaat langsung ke komunitas, safeguards ada, tapi disederhanakan, biayanya banyak dibantu donor internasional.

RMU tiap tahun habis setengah juta dollar untuk sertifikasi - monitoring, pengambilan data, dll. Untuk 5 juta ton. - tidak make sense buat komunitas.

Segmen pembelinya berbeda. Yang beli karbon Plan Vivo mau bayar lebih tinggi karena mereka tahu bahwa manfaatnya langsung ke masyarakat. Untuk swasta sebagai jembatan pengembang harus lebih susah meski manfaatnya dibagi ke masyarakat juga. Banyak kredit yang dimiliki RMU belum bisa dijual

RMU dan Warsi sudah teregistrasi di SRN - apakah ini artinya langsung diakui sebagai pencapaian NDC nasional? Menurut kami pemerintah harus fleksibel. Saat ini ada 30-40 proyek yang sudah dapat sertifikasi VCS. Sistem yang sudah diakui ini bisa diakui langsung oleh pemerintah supaya kami tidak harus mulai dari nol lagi dengan sistem yang baru. Kadang perhitungan dengan metodologi yang berbeda membuat jumlah beda dan ini menurunkan kredibilitas. Harus ada pasal peralihan yang benar dalam Perpres ini.

Banyak negara maju tertentu yang selalu membuat *goal post*-nya keep on moving. Awalnya setuju sekarang tidak, sekarang harus yurisdiksi dll. Kita harus terbuka, ada yang sistem G-to-G. Tidak boleh menutup proyek seperti kami berkembang. Begitu kami maju, masih banyak yang akan ikut. Kita jangan sampai membatasi pasar, dibuka kesempatan seluas-luasnya. Kalau pasar sudah dibuka dan memprioritaskan pasar dalam negeri, kita bisa memberlakukan *domestic market obligation* seperti di batubara. Intinya harus dibuat gampang supaya banyak yang ngikut dan playernya semakin banyak dan yang membantu melestarikan hutan dan gambut semakin banyak.

### ***Insentif langsung untuk masyarakat seperti apa? Perjanjinkah?***

- Ada MOU dengan masyarakat selama 3 tahun sekali - apa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan? Lalu ada perjanjian kerja sama pertahun
- Tidak boleh ada SKPD yang turut campur
- Ada pemilihan demokratis untuk ketua, bendahara sekretaris
- Ada perwakilan kaum muda dan masyarakat adat
- Kami mulai menyalurkan pendapatan karbon: dana ini harus dipertanggung jawabkan di masyarakat dan memberikan nilai tambah di tiga sektor: food (ketahanan pangan), water (air bersih) dan energy (sumber energi).
- Dibina agar self-governed - masyarakat bisa mengatur di antara mereka sendiri
- Sudah 10 tahun dibangun bersama masyarakat
- Secara transparan pendanaan yang disalurkan ke masyarakat bisa diukur



Apakah metodologi tertentu tersebut sudah di-approve pemerintah? Proses approvalnya seperti apa?

*Project-based* atau pendekatan yurisdiksi?

- Harus dua-duanya karena ada customer yang mau yurisdiksi dan ada yang mau proyek. Yang penting ujungnya 1+1 menjadi 2.

#### **Pertanyaan untuk Joko Tri, Badan Kebijakan Fiskal:**

- Selain RBP ada juga inisiatif carbon bond - apa lagi ini? Harus dipelajari risiko dan biaya supaya lebih baik
- Tentang provinsi konservasi - rezimnya adalah Rezim Transfer Daerah. Kalau pendanaan diberikan kepada provinsi yang terlanjur rusak adalah paradigma lama. Setting-an DAK sekarang tidak seperti itu. Perverse Incentive-nya sudah diperbaiki. Dana mengendap sudah diperbaiki.
- Kami mendorong mekanisme pembiayaan - tidak menunggu aliran dana publik. Kami mendorong teman-teman Mitra: Kemitraan, LTKL untuk banyak membantu daerah agar datang ke Kemenkeu (GCF) atau JCM. Pendanaan terbesar saat ini GCF tapi proposal yang datang ke kami tidak terlalu banyak.
- Paradigma dibalik:
- Standardisasi GCF harus tata kelola unggul agar dapat pendanaan.
- Kami percaya tidak akan mempersulit manfaat karbon untuk masyarakat.
- KLHK punya mekanisme ICER (Indonesian Certified Emission Reduction) - akan ada penyesuaian tapi tidak akan mempersulit.
- Pemerintah tidak akan mempersulit manfaat karbon untuk masyarakat karena masyarakat adalah penerima manfaat yang utama.
- Tentang lokasi, ditentukan KLHK yang penting jangan sampai ada satu lokasi dapat banyak dan lokasi lain tidak dapat sama sekali.
- Gita: pemerintah menjadi clearing house, mengecek siapa dapat akses dari kantung yang mana.
- Nanti ada aturan teknis - PermenLHK, PMK atau apa.

#### **Pertanyaan untuk Dicky Edwin**

- Skema sekarang akan scheme-based. Pemerintah bisa menjadi regulator. Tapi, fungsi tersebut jangan dicampur aduk. Contohnya: dana Norway. RBP bukan perdagangan karbon, tapi results-based payment. Ini berbeda dengan kegiatan Warsi dan RMU yang didasarkan pada metodologi yang memiliki skema (scheme owner). Metodenya sudah diuji, ilmiah, ada ISO. Makanya setiap skema beda-beda metodologinya. VCS = minimal ada validasi dari kegiatan. Ada juga proses verification
- Aset karbon nanti untuk siapa?
- Perdagangan karbon ada yang mandatory, voluntary, ada untuk NDC dan ada untuk lain-lain. Perlu disepakati dulu yang akan diatur yang mana?
- Pajak karbon bukan barang baru. Negara lain sudah ada. Kita baru PPN dan PPh. Akan sangat berbeda ketika nanti ada rezim pasar baru, bukan hanya untuk proyek karbon tapi proyek-proyek lain.

- Kita harus punya pemahaman yang sama tentang hal-hal dasar ini. Takutnya akan ada sektor yang kolaps, contoh perdagangan karbon karena ada risiko regulasi atau regulation risk. Di sektor energi, regulation risk sangat tinggi karena peraturan berubah-ubah tapi tidak pernah dilakukan.
- Diskusi dulu - pasar karbon mana yang mau diatur?

### Pertanyaan untuk Nadia Hadad

- Kalau baseline historis bagus tapi di Ranperpres ditulis baselinenya ditulis BAU (diproyeksikan)

**KEY WORDS:** Apa yang harus diprioritaskan dalam Nilai Ekonomi Karbon ke depan?

1. Rudi - Warsi: Kewenangan untuk masyarakat pemegang izin PS
2. Dharsono - RMU: Pasar dan Terbuka
3. Nadia - Madani: Perlindungan
4. Joko - BKF Kemenkeu: Definisi - Cakupan NEK (carbon trading, RPB, cap and trade, dan pungutan atas karbon)
5. Dicky - Yayasan Mitra Hijau: Regulation Risk
6. Jamris - Rio Laman Panjang: Lanjutkan

**YANG BIKIN PENASARAN...**

- KRITERIA 'KEBENDAAN' DAN STATUS LEGAL KARBON
- KEPEMILIKAN DAN ALAS HAK KARBON (i.e Perhutanan Sosial)
- TATA KELOLA & TATA NIAGA TRANSAKSI KARBON (i.e Prosedur)
- METODOLOGI PERHITUNGAN KARBON UNTUK TRANSAKSI
- MEKANISME DISTRIBUSI MANFAAT HINGGA TAPAK (i.e peran sebagai sequester, kebutuhan masyarakat yang riil dan untuk pendampingan teknis)
- ALOKASI AMBANG BATAS EMISI (Termasuk ketentuan Offset)
- REFERENSI TARGET (NDC) DAN BASELINE
- PRIORITAS LOKASI DAN STATUS LAHAN
- PROJECT DEVELOPER vs DAMPAK INDUSTRI (i.e Fossil Fuel, Agriculture)

Participants in the meeting: Rudi Syaf Kki Warsi, Nadia Hadad, Gita Syahrani | LTKL, Joko Tri Haryanto-BKF, Dharsono Hartono, Dicky Edwin Hindarto.